

**ANALISIS SOSIAL KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
STRUKTURAL ( SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK  
MASYARAKAT KABUPATEN WAJO )**



**SKRIPSI**

**Oleh :  
IBRAHIM  
10538307614**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ibrahim, NIM 10538 3076 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari tanggal 1 Februari 2019.

24 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, .....  
30 Januari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

Pengawas Umum: Prof. Dr. M. Abd. Rahman Rahim, S.Pd., M.M.  
Ketua: Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Sekretaris: Dr. Bahasillah, M.Pd.  
Penguji:

- 1. Dr. Andi Saib, S.Pd., M.Hum.
- 2. Dr. Sulayyah Qumaisy, M.Pd.
- 3. Jamahuddin Arifin, S.Pd., M.Pd.
- 4. Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.



Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860.934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575.474

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sosial Keterlibatan Perempuan dalam Struktural (Sebuah Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Kabupaten Wajo)

Nama : Ibrahim

NIM : 10538 3076 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Jumadil Awal 1440 H


Makassar,

30 Januari 2019 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Hidayah Qurin, M.Pd.


  
Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan EKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Menggali tanah untuk bongkahan emas maka akan dapat emas, namun jika tak serius hanya dapat tanahnya karena mencari kesuksesan tanpa keseriusan, kau hanya akan menemukan alasan” (Penulis)*

Karya Ini Persembahkan Terindah Buat:

Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, serta orang-orang yang selalu memotivasiku Atas keikhlasan memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat mewujudkan salah satu cita-citaku diantara tumpukan cita-cita penulis. Tulisan ini tidak sebanding dengan apa yang telah kalian semua berikan. Tulisan ini juga merupakan representasi cinta kasihku yang amat besar kepada kalian semua sekaligus sebagai kegelisahan dan keresahan yang tertumpah untuk para mereka yang menganggap remeh seorang perempuan, mendiskriminasi perempuan, ingatlah bahwa surga berada di telapak kaki seorang perempuan yang melahirkan kalian.

## ABSTRAK

**Ibrahim 2018. Analisis sosial keterlibatan perempuan dalam struktural (sebuah kajian sosiologi politik masyarakat Kabupaten wajo)** Universitas Muhammadiyah Makassar Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Hidayah Quraisy selaku pembimbing I dan Syarifuddin selaku pembimbing II.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural di kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimanakah peran perempuan dalam struktural pemerintahan dan bagaimana pendapat masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian ialah orang-orang yang memberikan informasi serta pendapat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, objek penelitian ialah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan Kabupaten Wajo serta masyarakat Kabupaten Wajo. Teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsionalis dan teori interaksi simbolik.

Hasil penelitian ini tentang keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo. Secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo masih kurang, hanya bertambah 2 dari jumlah anggota DPRD perempuan periode sebelumnya yaitu 5 ke 7. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam jabatan politik serta yang tidak terlibat. Perumusan kebijakan menjadi tidak efektif bagi keadilan suara perempuan dikarenakan kurangnya anggota perempuan di struktural.

**Kata Kunci:** *Analisis Sosial, Sstruktural, Perempuan.*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penyusunan skripsi ini selesai sesuai dengan waktu yang diperlukan. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Saw., Sang intelektual sejati ummat manusia yang menyampaikan pengetahuan dengan cahaya Ilahi, beliau manusia cerdas manusia paripurna.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi sejak lahir hingga hari ini merekalah manusia luar biasa yang pernah memberikan kasih sayang langsung pada saya tanpa perantara dan tanpa pamri.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd, M.Pd., Ph.D, selaku Dekan fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dra Hidayah Quraisy, M.Pd selaku pembimbing I, Syarifuddin S.PD., M.Pd selaku pembimbing II serta staf dan dosen pengajar Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua saudara saya yang berada di Jurusan Sosiologi dan Jurusan lain yang tidak sempat disebutkan, teman-teman dan adik-adik yang sudah banyak membantu penulis dalam berbagai masalah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari implemmentasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridha di sisinya, Amin.

Makassar, November 2018

Ibrahim

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KARTU KONTROL PEMBIMBING I.....	iv
KARTU KONTROL PEMBIMBING II.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
SURAT PERJANJIAN.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defisi Operasional.....	8

### BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka.....	11
1. Penelitian yang Relevan.....	11
2. Partisipasi.....	13



3. Pembagian Kerja Secara Seksual.....	17
4. Perempuan.....	22
5. Struktural Politik.....	28
6. Kesetaraan Gender dalam Negara Demokrasi.....	31
7. Kesetaraan Gender dalam Hukum dan HAM.....	33
8. Agama (Ulama) dalam Kesetaraan Gender.....	34
9. Landasan Teori.....	37
<b>B. Kerangka Pikir.....</b>	<b>41</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Lokus Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>C. Informan Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>D. Fokus Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>E. Instrumen Penelitian.....</b>	<b>48</b>
<b>F. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>48</b>
<b>G. Jenis Data dan Analisis Data.....</b>	<b>50</b>
<b>H. Keabsahan Data.....</b>	<b>52</b>

### **BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN**

<b>A. Sejarah .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Letak dan Kondisi Geografis.....</b>	<b>55</b>

### **BAB V BENTUK-BENTUK KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUAL**

<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>62</b>
1. Kuantitas Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo.....	62
2. Sebagai Perumus Kebijakan dan Pengambil Keputusan di Kabupaten Wajo.....	64

3. Komunikasi.....	66
<b>B. Penjabaran Hasil Penelitian.....</b>	<b>69</b>
<b>C. Interpretasi Hasil Penelitian.....</b>	<b>72</b>
 <b>BAB VI IMPLIKASI TERHADAP MASYARAKAT ATAS</b>	
<b>KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTURAL</b>	
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>76</b>
1. Pandangan Masyarakat .....	76
2. Pandangan Hukum dan HAM.....	80
3. Pandangan Agama (Ulama) .....	82
<b>B. Penjabaran Hasil Penelitian.....</b>	<b>84</b>
<b>C. Interpretasi Hasil Penelitian.....</b>	<b>88</b>
<b>D. Cara Kerja Teori.....</b>	<b>91</b>
 <b>BAB VII PENUTUP</b>	
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	
 <b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan .....	56
Tabel 5.1 Nama Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Wajo .....	63
Tabel 5.1 Interpretasi Hasil Penelitian .....	73
Tabel 6.1 Interpretasi Hasil Penelitian .....	89

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Wajo .....	56
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah panjang menuju kemerdekaan, tentunya tak lepas dari pengabdian dan campur tangan putra-putri bangsa. Hal ini telah tertuang dalam sebuah naskah yaitu sumpah pemuda, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam suatu Negara, jabatan/struktural politik seringkali menjadi batu loncatan bagi kalangan pemuda dan pemudi untuk membantu pembangunan melalui. Keikutsertaan di dalam parlemen dengan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis mampu memberi solusi bagi masalah-masalah yang ada di dalam struktural.

Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

Pembangunan nasional merupakan totalitas pembangunan daerah yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan perubahan, perbaikan dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah dan mencakup seluruh wilayah dan menyentuh seluruh aspek kehidupan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Kesadaran tentang pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan bukanlah didasarkan oleh pertimbangan kemanusiaan semata, tetapi didukung oleh pertimbangan rasional dengan melibatkan potensi yang dimiliki oleh perempuan dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan utamanya dalam keterlibatan mereka pada penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara umum termasuk pembangunan ekonomi.

Upaya pemerintah Indonesia meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan dimulai sejak 22 tahun yang lalu. Saat ditunjuknya seorang menteri muda urusan peranan wanita yang bertanggung jawab dalam mekanisme nasional peningkatan peranan wanita. Kebijakan ini merupakan tanggapan pemerintah Indonesia atas di canangkannya tahun perempuan internasional oleh PBB pada tahun 1975 yang bertema “Persamaan, Pembangunan dan perdamaian.”

Di antara kesepakatan internasional penting yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia adalah konvensi PBB tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” pada tahun 1994 konvensi ini mewajibkan negara untuk merumuskan kebijakan, hukum dan program-program yang berkaitan dengan pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan. Namun sayang, meski kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia banyak mengurangi ketimpangan dan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, namun belum terlihat pada jabatan-jabatan politik di berbagai daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal.

Perempuan yang jumlahnya lebih separuh anggota masyarakat bisa menjadi sumber daya yang sangat potensial. Aktualisasi perempuan sebagai sumber daya pembangunan dan pengembangan diri dapat menyokong keseimbangan tindakan politik.

Selain dimensi budaya, hal ini juga dapat ditinjau dari dimensi politik. Kesempatan untuk perempuan juga sangatlah besar dalam bidang politik pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.

Pola pandangan masyarakat umum berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada

akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga, karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Berbagai perangkat hukum telah ditetapkan untuk melaksanakan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Tetapi semua itu belum cukup untuk mengantarkan kaum perempuan sebagai mitra sejajar pada kaum lelaki. Dalam kenyataannya, meskipun iklim yang berkembang mulai memberikan peluang, namun masih banyak aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor kultural dan sosial yang masih menghambat pengembangan perempuan.

Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang kita ketahui hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih bisa digaris bawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh warga negara.

Dalam negara demokrasi, bentuk keterlibatan/partisipasi perempuan dan laki laki pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan akan berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk menciptakan keadilan. Berdasarkan pengamatan secara faktual, terlihat bahwa perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala hal. Ini disebabkan oleh banyak



faktor yang salah satunya berasal dari budaya patriarki yang telah berhasil mengerdikan jiwa dan mengikis kepercayaan diri kaum perempuan.

Perempuan dulu enggan untuk bersekolah tinggi, akibatnya kualitas pendidikan menjadi rendah dan ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan yang sulit terpecahkan karena kurang berdayanya perempuan itu sendiri. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya daya saing dalam meraih peluang untuk menduduki posisi-posisi strategis pada lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun publik.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan,

Bentuk-bentuk peran dan tindakan perempuan yang telah masuk dalam struktural lebih dulu seharusnya menjadi acuan bagi perempuan lain untuk lebih memperkuat posisi selanjutnya di struktural pemerintahan. Dalam perumusan kebijakan, perempuan baiknya lebih aktif merekomendasikan pendapat-pendapat yang lebih sehingga pandangan masyarakat umum terhadap perempuan mendapat nilai lebih dan menjadi tolak ukur serta penyemangat bagi perempuan lainnya.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki struktural pemerintahan yang baik. Namun yang menjadi sorotan adalah jumlah dan peran perempuan dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Wajo masih sangat kurang yaitu kurang dari 20%.

Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan perempuan yang menjadi kepala desa hanya ada 16 dari 142 desa di Kabupaten Wajo , Sedangkan jumlah anggota DPRD hanya ada 6 orang perempuan dari 40 anggota. Selain itu selama ini yang menjadi pertanyaan adalah di Kabupaten Wajo tidak pernah ada sosok perempuan yang tampil mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah mulai menampilkan sosok-sosok putri daerahnya untuk menjadi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Dari fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji dalam masyarakat, bagaimana respon ketertarikan perempuan di kabupaten Wajo untuk terlibat dalam struktural pemerintahan. Bahkan ketika pemerintah dan negara telah memberi kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik.

Selanjutnya untuk melihat bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural di Kabupaten Wajo serta implikasi terhadap keluarga dan masyarakat dari peran keterlibatan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut : “Analisis Sosial Keterlibatan Perempuan Dalam Struktural ( sebuah kajian sosiologi politik masyarakat Kabupaten Wajo )”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya peneliti berusaha mengungkapkan tentang keterlibatan perempuan dalam jabatan politik, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana implikasi terhadap keluarga dan masyarakat atas keterlibatan perempuan dalam struktural di Kabupaten Wajo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural di kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap keluarga atas keterlibatan perempuan dalam struktural di kabupaten Wajo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melihat dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengupayakan

peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintah khususnya dalam partai politik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari aspek akademis menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain yang memiliki kepedulian terhadap perempuan atau dalam hal ini kesetaraan gender khususnya dalam ketertarikan perempuan dalam menempati struktural dalam suatu daerah.
2. Sebagai media informasi bagi publik tentang keterlibatan perempuan dalam struktural di kabupaten Wajo.
3. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pemerintahan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah ruang lingkup atau penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan penafsiran. Beberapa istilah–istilah dengan batasan pengertian yang dituliskan sebagai berikut:

1. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992,141). Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

2. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 ) h.8-9).
3. Perempuan diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, dengan kata dasar wan yang berarti nafsu atau objek seks dan dalam bahasa Jawa (jarwa dosok), kata wanita berarti wani ditata, artinya berani diatur. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah wanita karena pemaknaan kata wanita lebih dekat dengan kesadaran praktis masyarakat Jawa. Bahwa kata wanita berasal dari kata wani (berani) dan ditata (diatur).
4. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya suatu keterlibatan serta peran seseorang terhadap sebuah organisasi atau lembaga.
5. Keterlibatan adalah keterlibatan mental, pemikiran dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan

kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

6. Struktural politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan dan organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi secara harfiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik adalah pelebagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Penelitian yang Relevan**

Kesenjangan peran perempuan membuat beberapa peneliti melakukan penelitian tentang hal tersebut. Berikut adalah penelitian tentang kesenjangan perempuan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

- a) Penelitian pertama dilakukan oleh *Cholida Eka Anggraini dan Joko Sutarso (2017)*, dengan judul penelitian “Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDI dan PKS Kota Surakarta”. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: 1) strategi komunikasi politik. Komunikasi internal dalam PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta dengan dilakukan dengan rapat inti pengurus sebagai bentuk komunikasi ke atas. Penyebaran informasi kebijakan-kebijakan partai hingga ke tingkat paling rendah dalam tatanan struktur kepartaian melalui koordinasi di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk komunikasi ke bawah. 2) Strategi Komunikasi politik eksternal partai politik dengan masyarakat menggunakan program-program yang dikeluarkan oleh partai. PDI Perjuangan melalui program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Adapun PKS membentuk enam program unggulan partai, yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), Sejahtera Study Club (bimbingan belajar gratis), Cluster Business (kelompok

bisnis), Pembinaan Remaja Masjid, Senam Nusantara dan komunitas hobi. 3) Dalam proses rekrutmen calon legeslatif PDI Perjuangan dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legeslatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Sedangkan PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legeslatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Murdianto (2009), dengan judul penelitian “Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta”. Dengan hasil penelitian, Pertama, Implementasi kebijakan kuota perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yakni mengamanatkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ada partai politik bahkan yang sama sekali tidak memasukkan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD. Kedua, Keadilan gender (gender equality) dalam Pemilihan Umum legislatif 2009 juga belum terwujud, terutama terkait dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kehadiran perempuan dalam partai politik



(misalnya sebagai pengurus partai) belum menjadi perhatian serius partai politik. Hal itu terlihat dari kepengurusan partai politik atau daftar calon anggota DPRD yang masih kurang melibatkan perempuan.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti dan Adelita Lubis, dengan judul penelitian “Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan”. Dengan hasil penelitian, Peran Perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di mata masyarakat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan adanya ikut serta perempuan mensosialisasikan di masyarakat, perempuan bisa menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kota Medan. Para perempuan atau kader perempuan begitu antusias dalam memenangkan kursi di parlemen mereka begitu aktif dan peduli sudah mempersiapkan diri dari hari sebelumnya untuk tampil di ranah panggung politik. Begitu juga dengan perempuan yang di masyarakat mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk memilih pemimpinnya, para perempuan begitu peduli jika ada PEMILU mereka langsung buru antusias melihat calon pemimpinnya di banding para laki-laki.

## **2. Partisipasi**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,

modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi dimana partisipasi dapat juga berarti pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Ada 2 (dua) partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- 1) Partisipasi Langsung, merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi tidak langsung, merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu :

- 1) Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- 4) Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

#### **b. Bentuk Partisipasi**

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:58), terbagi atas:

- 1) Partisipasi vertical, terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- 2) Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Partisipasi fisik, adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- 2) Partisipasi non fisik, adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

### **3. Pembagian kerja secara seksual**

Pembagian kerja secara seksual merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan tertua dan terkuat sehingga orang cenderung beranggapan bahwa pembagian kerja secara seksual dimana laki-laki bekerja disektor publik dan perempuan disektor domestik sebagai sesuatu yang alamiah. Sepintas pembagian kerja secara seksual jelas tidak adil terutama bagi kaum perempuan. Namun banyak perempuan yang tidak menganggapnya begitu, banyak perempuan bahkan menerima peran yang diberikan kepada mereka sebagai suatu hal yang mulia dan harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, perempuan sebagai kaum yang dirugikan tidak sadar akan keadaannya. Pembagian kerja yang didasarkan atas perbedaan seks, dimana perempuan sudah sewajarnya hidup dilingkungan rumah tangga sedangkan pria punya tugas lain, yaitu pergi keluar rumah, bekerja untuk mendapatkan gaji.

Pembagian kerja seperti ini dimaksudkan untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang tentram dan sejahtera serta menciptakan kehidupan masyarakat manusia yang beradab. Pembagian kerja seperti itu sudah berlangsung sangat lama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Banyak diantara kita tidak bertanya apakah hal itu adil dan siapa yang diuntungkan dalam pembagian kerja secara seks ini. Kita beranggapan bahwa perbedaan peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sama nilainya, keduanya adalah peran yang luhur dan karena itu patut dibanggakan. Namun pada saat ini, pembagian kerja secara seksual tidak lagi dapat diterima begitu saja terutama oleh kaum perempuan

Perempuan kini merasa pembagian kerja secara seksual hanya menguntungkan laki-laki saja sehingga perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki. Kehidupan perempuan berputar sekitar kehidupan rumah tangga, seakan-akan perempuan “dipenjarakan” dalam suatu dunia yang tidak dapat merangsang perkembangan kepribadiannya. Perempuan mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja setiap hari (pekerjaan rumah tangga) selama hidupnya. Dengan kata lain, perempuan terjebak dalam suatu rutinitas dalam hidupnya.

Adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil dan merugikan kaum perempuan. Kebanyakan dari mereka yang tidak puas pada keadaan ini mengadakan gerakan-gerakan yang intinya menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan-gerakan tersebut dikenal sebagai *gerakan feminis*. Secara umum, ada 3 (tiga) golongan gerakan feminis, yaitu :

1. Kaum Feminis Liberal (kaum feminis hak-hak perempuan).

Mendasarkan gerakannya pada prinsip-prinsip falsafah liberalisme, yaitu bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama dan setiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Gerakan kaum feminis liberal beranggapan bahwa sistem patriakal dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar akan hak-hak ini dan harus menuntut apa yang menjadi haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah merata maka dengan kesadaran baru ini manusia akan membentuk suatu masyarakat baru dimana laki-

laki dan perempuan dapat bekerja atas dasar persama-rataan. Bagi kaum feminis liberal, ada 2 (dua) cara untuk mencapai tujuan ini :

Pertama adalah melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu. Ini mereka lakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran perempuan-perempuan yang mengikuti diskusi ini, bahwa mereka sebenarnya telah diperlakukan secara tidak adil, bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk menghapuskan ketidakadilan ini.

Kedua adalah dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan secara sama rata dengan laki-laki.

## 2. Kaum Feminis Radikal

Mendasarkan perjuangannya pada karya-karya yang ditulis oleh Kate Millet (1970) dan Shulamith Firestone (1972). Gerakan ini beranggapan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab pembagian kerja secara seksual adalah *sistem patriakal*. Sistem patriakal ini dibahas secara terperinci oleh Millet (1970) yang mengatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat merupakan hubungan politik. Dia mendefinisikan politik sebagai hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat dimana satu kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok manusia yang lain. Struktur kekuasaan dimana laki-laki mengendalikan perempuan disebut *patriarki*.

Lembaga utama patriarki adalah keluarga. Firestone berpendapat bahwa apa yang alamiah tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi pembagian kerja secara seksual. Seperti yang dinyatakan oleh Simone de Beauvoir, faktor-faktor biologis ini tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya hierarki berdasarkan *sex* (jenis kelamin) karena badan bukan merupakan *benda* melainkan situasi. Kemanusiaan telah berkembang melampaui batas-batas alam. Perkembangan teknologi telah memungkinkan perempuan membebaskan dirinya dari keterbatasan kebadanannya. Penggunaan faktor-faktor kebadanan untuk menciptakan pembagian kerja secara seksual merupakan kerja politik.

### 3. Kaum Feminis Sosialis

Mendasarkan perjuangannya pada teori Engels atau lebih tepat lagi teori-teori Marxist pada umumnya. Kaum feminis sosialis memberi perhatian yang besar pada kondisi sosial ekonomi. Mereka percaya, berdasarkan teori *Substruktur* dasar-dasar materiil dari masyarakat, yaitu sistem sosial ekonomi dari masyarakat tersebut dan siapa yang diuntungkan oleh sistem ini; dan *Superstruktur* organisasi masyarakat yang mendukung sistem pembagian hasil-hasil produksi yang pincang ini, misalnya sistem nilai-nilai masyarakat tersebut, sistem hukum yang ada, dan sebagainya. Pembagian pekerjaan berdasarkan seksual hanyalah merupakan bagian dari superstruktur yang akan hancur dengan sendirinya bila superstruktur berubah.

Di negara-negara yang telah mengakui keberadaan perempuan, mereka memberi kaum perempuan beberapa jenis persamaan di muka hukum terutama dalam hak mendapatkan pendidikan, kekayaan, perkawinan, dan perceraian. Para



perempuan praktis menduduki setiap pekerjaan dan kini membentuk suatu fraksi profesi dan birokrasi besar. Retorik Marxist tentang persamaan seks apapun tujuannya membebaskan perempuan untuk mengisi dua tugas. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, adanya kebebasan tersebut justru menjadi beban ganda bagi perempuan. Peran laki-laki sama sekali tidak berubah, sedangkan tanggungjawab perempuan dalam rumah tangga ditambah dengan suatu tugas luar (sektor publik). Perempuan masih tetap mengerjakan urusan rumah tangga dan sebagian besar urusan belanja, merupakan tugas yang sangat memakan waktu dan tenaga. Tampaknya, tugas rumah tangga akan selalu melekat pada peran setiap perempuan. Di dalam masyarakat sudah tertanam dengan kuat bahwa urusan rumah tangga – termasuk mengurus anak – menjadi tanggungjawab dan kodratnya seorang perempuan, bukan tanggungjawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Seakan-akan kebebasan yang diberikan tersebut sepintas lalu mengangkat derajat perempuan karena bisa sejajar dengan laki-laki, tetapi kenyataannya hal tersebut justru menjadikan tanggungjawab perempuan bertambah. Apabila dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, dimana suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah (sektor publik) untuk mencari nafkah, mereka berdua memikul tanggungjawab di luar. Karena mereka sama-sama memikul tanggungjawab di luar, maka sewajarnya mereka juga memikul tanggungjawab di dalam, yaitu bersama-sama menjalankan urusan rumah tangga sehingga beban istri dalam mengurus rumah tangga menjadi lebih ringan. Mereka bisa melakukan pembagian tugas dalam rumah seperti siapa yang harus mencuci pakaian atau piring, menyapu dan mengepel dan tugas rumah tangga lainnya sehingga tidak ada pihak

yang merasa dirugikan. Anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas perempuan cepat atau lambat harus dihapuskan, jika tidak, perempuan akan selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah yang hanya bisa mengerjakan tugas rumah tangga. Tampaknya perjuangan kaum perempuan tidak akan berhenti sampai cita-cita kaum perempuan yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam maupun di luar rumah terpenuhi.

#### **4. Perempuan**

Masyarakat sudah mengenal adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sejak manusia itu ada di muka bumi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini didasari oleh apa yang melekat pada individu itu sendiri, perbedaan serupa ini atas dasar unsur biologis. Tetapi selain perbedaan yang didasari oleh unsur-unsur biologis, ada pula perbedaan yang didasari oleh akal budi manusia, yaitu hasil berfikir.

Perempuan memang bukan kelompok yang rentan, seperti anak, lansia, dan penyandang cacat, melainkan kelompok yang terdiri atas setengah jumlah penduduk yang diharapkan memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya sebagai warga negara seperti halnya laki-laki. Di dalam kehidupan manusia baik di keluarga maupun di masyarakat, perbedaan secara biologis maupun perbedaan yang didasari oleh unsur-unsur sosial terkadang menjadi problematika terhadap eksistensi perempuan di segala bidang, tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Perempuan tidak untuk diistimewakan daripada laki-laki, melainkan perempuan harus memberdayakan dirinya. Berdaya dalam arti bisa mengatasi

persoalan-persoalan dalam kehidupan. Tentunya, ini berkaitan dengan pengembangan diri setiap perempuan dalam mengatasi berbagai persoalan. Baik sebagai individu, ibu, maupun sebagai salah satu unit dari masyarakat dan negara.

#### **a. Gerakan Perempuan dalam Perspektif Sejarah**

Gerakan perempuan sering dikaitkan dengan upaya menghapuskan subordinasi gender. gerakan perempuan sebagai spektrum yang menyeluruh dari perbuatan dan kegiatan secara individual atau kolektif melalui kelompok dan organisasi, baik sadar atau tidak sadar yang menaruh perhatian pada upaya megeliminir berbagai aspek subordinasi gender yang biasanya berjalanan dengan penindasan lainnya (kelas, ras, etnis, umur dan seks). Definisi tersebut menyiratkan bahwa gerakan perempuan identik dengan gerakan feminis. Sebagian pengkaji gerakan perempuan melihat bahwa kelahiran gerakan perempuan feminis memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Serikat gerakan perempuan feminis lahir seiring dengan perkembangan ekonomi dan demografi paska Perang Dunia II.

Agenda dunia yang pertama setelah Perang Dunia ke Dua adalah mendirikan Organisasi Global yang mampu menegaskan komitmen manusia untuk membentuk kemanusiaan baru pada kehidupan manusia. Universal Declaration in Human Rights telah dideklarasikan oleh PBB pada 1946 dan dikodifikasikan pada 1966 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

Rights. Deklarasi tersebut sangat “netral” karena memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam deklarasi tersebut, tidak disebutkan atau dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Langkah kedua adalah mengembangkan instrumen dan indikator untuk mengukur kesejajaran pembangunan untuk laki-laki dan perempuan. Pada 1947, USAID membentuk *Women in Development*. Dalam mengembangkan kesejajaran perempuan dan laki-laki, ada dua paradigma. Paradigma pertama disebut dengan “*Women in Development*” (WID). Konsep ini mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Prinsip-prinsip dasarnya berangkat dari gagasan bahwa perempuan berada di belakang karena mereka tidak ikut serta dalam pembangunan.

Konsep tersebut berjalan beriringan dengan konsep paradigma pembangunan waktu itu yang mengatakan bahwa kesejajaran muncul untuk menyeimbangkan pertumbuhan. Paradigma tersebut menghadapi berbagai kritik yang dipelopori oleh kaum feminis Selatan dan jaringan internasional Development Alternatives for Women in a New Day (DAWN), dengan catatan bahwa WID merupakan pengesampingan perempuan dalam pembangunan. Kritik itu muncul dari pendekatan kaum struktural yang mengatakan bahwa ketidaksejajaran tidak akan pernah muncul mampu menandingi paradigma itu.

Kritik pertama muncul dari pendapat yang mengatakan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penyesuaian struktural atau reformasi daripada peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kesejajaran tak

mampu mengatasi karena perbedaan posisi laki-laki dan perempuan terjadi secara struktural. Kritik kedua, berhubungan dengan yang pertama, mengatakan bahwa persoalan utamanya bukan pada perbedaan jenis kelamin namun pada perbedaan sosio-kultural. Konsep penyetaraan laki-laki dan perempuan adalah mentransformasi teori “nature” ke “nurture”. Maka muncullah istilah gender.

*Gender and Development* (GAD) merupakan paradigma kedua dalam meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini banyak tempat menggantikan paradigma pertama. WID dengan latar belakang teori Modernisasi digantikan oleh GAD dengan pendekatan pembangunan paska teori modernis. Namun, sebagaimana halnya paradigma dalam ilmu sosial, GAD tidaklah menggantikan WID melainkan hanya meminggirkan. Artinya, GAD menjadi arus tengah (mainstream). Bahkan, masih banyak negara yang menggunakan secara bersamaan paradigma WID dan GAD.

#### **b. Peranan Perempuan dalam Pembangunan**

Pembangunan nasional merupakan totalitas pembangunan daerah yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan perubahan, perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah dan mencakup seluruh wilayah dan menyentuh seluruh aspek kehidupan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Kesadaran tentang pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan bukanlah didasarkan oleh pertimbangan kemanusiaan semata, tetapi didukung oleh pertimbangan rasional dengan melibatkan potensi yang dimiliki oleh perempuan dan peluang

yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan utamanya dalam keterlibatan mereka pada penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara umum termasuk pembangunan ekonomi.

Upaya pemerintah Indonesia meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan dimulai sejak 22 tahun yang lalu. Saat ditunjuknya seorang menteri muda urusan peranan wanita yang bertanggung jawab dalam mekanisme nasional peningkatan peranan wanita. Kebijakan ini merupakan tanggapan pemerintah Indonesia atas di canangkannya tahun perempuan internasional oleh PBB pada tahun 1975 yang bertema “Persamaan, Pembangunan dan perdamaian.”

Di antara kesepakatan internasional penting yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia adalah konvensi PBB tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” pada tahun 1994 konvensi ini mewajibkan negara untuk merumuskan kebijakan, hukum dan program-program yang berkaitan dengan pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun sayang, meski kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia banyak mengurangi ketimpangan dan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, namun belum terlihat pada jabatan-jabatan politik di berbagai daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal.

Keterampilan untuk merumuskan dan melaksanakan hukum, kebijakan dan program pembangunan yang memasukan pengalaman perempuan sangatlah kurang atau bahkan tidak ada sama sekali (Saptari, 1997:7).

### **c. Perempuan Bugis**

Dalam sejarahnya di negeri Bugis pernah melahirkan beberapa tokoh intelektual wanita. Salah satunya adalah Nene' Mallomo. Nene' Mallomo merupakan salah satu tokoh cendekiawan terkemuka di Sulawesi Selatan dan telah menjadi simbol yang melegenda di daerah Bugis. Salah satu hasil dari buah pemikirannya adalah berupa sebuah prinsip yang harus dijalankan oleh aparat kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Prinsip tersebut dikenal dengan ungkapan "Naiya Ade' Temmakkeana' Temmakkeappo" (hukum tidak mengenal anak cucu). Wanita kedua adalah Siti Aisyah Tenri We Tenriolle, sang penyelamat naskah Lagaligo.

Lagaligo merupakan naskah kuno dari Luwu yang ditulis dalam bahasa Bugis kuno (lontara). Naskah ini dianggap sebagai karya epos terpanjang di dunia. We Tenri Olle perempuan bugis yang juga penguasa di Tanete mendirikan sekolah rakyat yang lebih dahulu 1890an, berpuluh-puluh tahun lebih dahulu dari Kartini. Nene' Mallomo dan We Tenri Olle dua figure wanita yang bebas di zamannya. Mereka tidak terkungkung oleh zaman dan adat yang merendahkan para wanita. Perempuan di tanah Bugis mempunyai tempat yang terhormat dalam pranata sosial termasuk dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Mereka tidak hanya menampilkan kecantikan fisik semata. Di bumi yang memerdekakan petuah atau kebijaksanaan sebagai pijakannya

kehadiran wanita menjadi penyeimbang. Sejak lama kerajaan di Bugis dikenal dengan kesetaraan gender. Dalam literatur sejarah dikenal beberapa raja/ratu perempuan yang memimpin di jazirah Sulawesi bagian selatan

Perempuan Bugis menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy atau dipekerjakan paksa sehingga membatasi aktifitas/kesuburan mereka, dibanding yang dialami kaumnya di belahan dunia lain) Namun dibalik jejak langkah perempuan Bugis terselip peran vital para lelaki. Kaum Adam yang memberi ruang yang lebar bagi perempuan Bugis untuk berkiprah lebih luas. Di zaman digital yang serba kompleks kehadiran wanita yang cerdas sangat diharapkan. Jangan lupakan bahwa dari rahim wanita akan lahir tunas yang menyemai peradaban. (Indra Sastrawat, 2014:45).

## **5. Struktural Politik**

### **a. Pengertian Struktur Politik**

Struktur berarti badan dan organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi secara harfiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

Mesin politik formal adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik



Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika yaitu legislative, eksekutif, yudikatif.

Mesin politik informal adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi, golongan petani merupakan kelompok mayoritas (*silent majority*), golongan buruh, golongan *Intelegensia* merupakan kelompok *vocal majority*, persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau seniman, kenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan penekan.

#### **b. Suprastruktur Politik**

suprsastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. Rule Making ( membuat UU ), fungsi ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat ( badan legeslatif ) seperti DPR, DPR I, DPRD II, DPRD.
2. Rule Application ( pelaksan undang-undang ), adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan yang telah dibuat oleh badan legeslasi sebagaimana yang tercantum dalam rule making.
3. Rule Adjudication ( mengadili pelaksanaan Undang-Undang ), badan yang memiliki fungsi ini adalah badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan komisi yudisial serta badan kehakiman yang ada sampai ke daerah.

**c. Infra Struktur**

Infra struktur adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi infra struktur, yaitu :

1. Pendidikan Politik adalah fungsi untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya
2. Artikulasi Kepentingan adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat seperti LSM, Ormas, dan OKP.
3. Agregasi Kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, misalnya partai politik

4. Rekrutmen politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi rakyat.
5. Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat

## **6. Kesetaraan Gender dalam Negara Demokrasi**

Arus demokrasi (demos=people, rakyat dan kratos=strength/kekuatan, power/kekuasaan, rule) dari Yunani Kuno melalui Aristoteles mengalir kuat ke seluruh dunia, dan diadaptasi oleh berbagai negara, terutama Amerika Serikat (Abraham Lincoln 1863, dan hingga sekarang dapat disaksikan melalui patung liberty-nya), demikian juga dengan Inggris (Abad ke 17 melalui John *Lock=live and let live*), di Perancis (melalui revolusi dahsyat 1789, dengan pemenggalan kepala rajanya Louis XVI dan permaisurinya Marie Antoinette/1793 dengan 3 slogan utamanya (*liberte, equalite, fraternite*)).

Demokrasi memberikan pencerahan terhadap kekuatan rakyat dalam sistem pemerintahan Negara, yang mampu meluluh-lantahkan sistem monarki maupun sistem oligarki yang dianggap tidak relevan dengan kemanusiaan. Konsep ini sangat menarik, mempesona, dan bahkan menjadi ideologi dunia yang mengedepankan hak asasi manusia/individu/rakyat. Demokrasi kemudian memberi kontribusi yang sangat besar terhadap gerakan perempuan di seluruh dunia. Demokrasi menjadi pemicu kebangkitan perempuan untuk ikut andil dalam segala hal yang berhubungan dengan Negara Demokrasi sebagai pil kuat perempuan untuk bangkit di tengah

keterpurukannya di dalam melawan hegemoni negara yang lebih mengedepankan laki-laki di arena publik ketimbang perempuan.

Demokrasi bagaikan obat mujarab yang tidak boleh tertolak oleh kaum perempuan yang bijak terhadap negara, terhadap kebaikan bersama, terhadap kepentingan bersama. Demokrasi memberi roh kebangkitan untuk tempat bersandar/bertumpunya kaum perempuan yang tertindas dan termarginalisasikan oleh kultur maupun struktur. Demokrasi menjadi instrumen kaum perempuan untuk memuluska jalannya menuju keadilan peran. Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan Undang-Undang.

Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di jalur politik terlepas atas pro dan kontra, bahkan satu diantaranya yakni Megawati (yang justru terlihat sangat keibuan), sukses menjadi presiden Republik Indonesia. Sang presiden perempuan ini telah berhasil meluluh lantahkan pandangan pesimis terhadap kaum perempuan Indonesia memasuki wilayah politik pemerintahan. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen bangsa Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya dapat memberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang dan pembangunan.

## **7. Kesetaraan Gender dalam Hukum dan HAM**

Penyelenggaraan KKG bertujuan:

- a) mewujudkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara sehingga memiliki hak yang sama dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan dan hak asasi manusia.
- b) mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara, adil, dan beradab dengan tetap menjaga dan menghargai norma agama dan sosial yang telah berlaku dalam masyarakat.
- c) menghapus segala bentuk Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.
- d) mempercepat tercapainya persamaan substantif antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar di segala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang berkualitas.

### **Pasal 13**

Tindakan KKG di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

- a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan
- b) membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi dan/atau perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

## **Pasal 15**

Tindakan KKG di bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilaksanakan melalui:

### **a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:**

1. untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya;
2. dalam memperoleh manfaat kebijakan sosial; dan

### **b. perlindungan setiap orang dari tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan KKG.**

Pelaksanaan tindakan KKG di bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga dan menghormati adat budaya setempat.

## **8. Agama ( Ulama ) dalam Kesetaraan Gender**

Mengaitkan agama dan gender adalah pembahasan yang menajdi rumit sejak dahulu. Pandangan dari para ulama berbeda beda dan masing masing memiliki dasar yang jelas dan kuat, yaitu berupa firman Allah Swt di dalam Al-Quran maupun Hadis.

Pandangan ulama sebagian menjelaskan bahwa yang baik terlibat dalam lingkup pekerjaan dan mencari nafkah adalah seorang laki-laki. Menurut mereka seorang laki-laki memiliki pemikiran yang lebih luas dan lebih prima. Hal ini di dasarkan pada penafsiran QS. AN-Nisa ( 4 ) : 32 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Para ahli tafsir menyatakan dalam ayat tersebut laki-laki berarti seorang pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Namun tidak semua ulama sependapat dengan pandangan di atas. Pandangan sebagian ulama berbeda pula, karena menurut mereka hal ini tidak berlaku umum dan mutlak artinya tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan, bisa saja sesuatu itu berbeda dengan bergantinya zaman. Rasulullah Saw bersabda :

9. النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ

“Wanita adalah syaqa’iq (saudara kandung) pria.” ( H.R Abu Dawud dan At-Tirmidzi ).

Kemudian dasar kedua yang menjadi acuan sebagian ulama untuk mendukung pergerakan perempuan yaitu pada QS. At-Taubah (9):71 dan QS. An-Nahl (16):197 sebagai berikut :

QS. At-Taubah (9):71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

QS. An-Nahl (16):97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ



Artinya :

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ulama berpandangan bahwa amah saleh yang menjadi pembeda dari setiap manusia , oleh karena itu laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling tolong menolong. Perempuan bisa saja terlibat dalam kegiatan lain baik itu politik selama mereka bisa menjaga diri dan keluarga mereka. Sebagai tambahan Umar bin Khattab yang dikenal pernah mengubur anak perempuannya sendiri, beliau mengatakan :

*“ Kami semula sama sekali tidak menganggap ( terhormat, penting ) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami. “*

## **9. Landasan Teori**

### **a. Teori Interaksi Simbolik**

Teori interaksi simbolik adalah teori yang dibangun sebagai respon terhadap teori-teori psikologi aliran behaviorisme, behaviorisme, etnologi, serta struktural-fungsionalis. Teori ini sejatinya dikembangkan dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi dan memiliki seperangkat premis tentang bagaimana seorang diri individu (*self*) dan masyarakat (*society*) didefinisikan

melalui interaksi dengan orang lain dimana komunikasi dan partisipasi memegang peranan yang sangat penting.

Teori interaksionisme simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19 kemudian menyeberang ke Amerika terutama di Chicago. Sebagian pakar berpendapat, teori interaksionisme simbolik dikembangkan oleh George Herbert Mead. Namun terlebih dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (*action theory*) yang dikemukakan oleh filosof dan sekaligus sosiolog besar Max Weber (1864 – 1920).

Simbol merupakan esensi dari teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Teori Interaksi Simbolik merupakan sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan manusia lainnya, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini, dan bagaimana nantinya simbol tersebut membentuk perilaku manusia. Teori ini juga membentuk sebuah jembatan antara teori yang berfokus pada individu-individu dan teori yang berfokus pada kekuatan sosial.

**George Herbert Mead** menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan kejadian. Pemaknaan ini diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan pihak lain yakni dalam konteks komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal atau *self-talk* atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia

mengembangkan *sense of self* dan untuk berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, Scott Plunkett mendefinisikan interaksionisme simbolik sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain.

#### **b. Teori Struktural Fungsional**

Adapun landasan teori mengenai pembahasan diatas adalah Teori Struktural Fungsional. Teori structural fungsional menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Dalam teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap unsur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori cenderung hanya melihat pada sumbangan satu sistem atau peristiwa pada sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem tidak dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi sistem lainnya bagi suatu sistem sosial. Secara ekstrim, penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat dengan demikian pada tingkat tertentu ketidakstabilan sosial, perbedaan ras, dan kemiskinan akan

diperlukan dalam suatu masyarakat. Perubahan akan terjadi perlahan-lahan dalam suatu masyarakat.

Robert K. Merton salah satu aktivis teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari salah satu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya. Hanya saja menurut Merton, sering terjadi pencampuran antara motif-motif subjektif dan pengertian fungsi. Padahal perhatian fungsionalisme harus lebih ditujukan kepada fungsi dibandingkan dengan motif-motif. (George Ritzer, 2013).

Konsep utama teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti konsepnya adalah sebagai berikut. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya beberapa posisi dalam suatu masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang antara individu dalam masyarakat itulah yang menjadi perhatian para sosiolog. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi.

## **B. Kerangka Pikir**

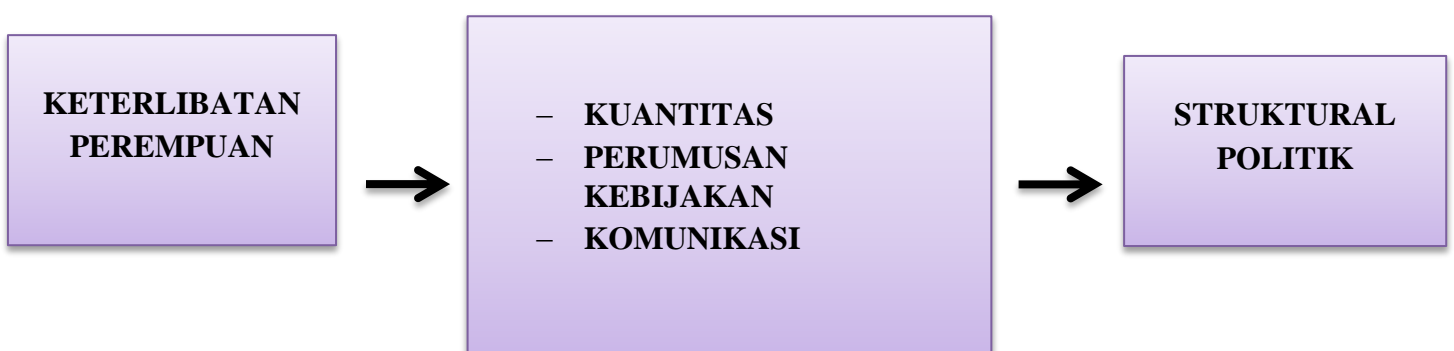
Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas

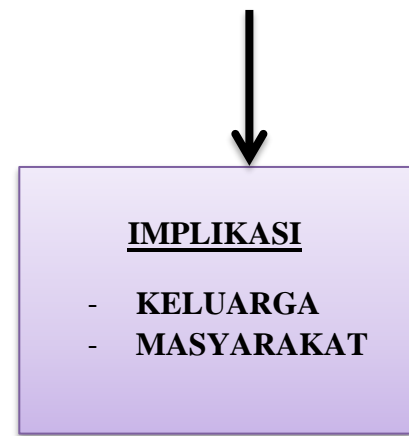
menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang kita ketahui bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam struktural memberikan peluang yang lebih baik terhadap pembangunan di suatu daerah. Melihat dari hasil hasil penelitian sebelumnya di daerah lain bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat menyeimbangkan pembangunan, namun yang menjadi masalah kemudian bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural di kabupaten Wajo dan bagaimana implikasinya/dampaknya terhadap masyarakat dan keluarga khususnya. Kajian terhadap bentuk bentuk keterlibatan dan impilkasinya perlu diketahui setiap orang dan menjadi kritikan keras bagi peneliti sosial.

Pengaruh keterlibatan perempuan dalam mencapai tujuan dari struktural politik harus menjadi perhatian dari masyarakat. Segala bentuk tindakan dan partisipasi yang dilakukan perempuan harusnya menjadi tugas dari peneliti, karena akan menjadi sumber yang baik untuk perempuan lain yang ingin lebih berpengaruh dan mengembangkan pembangunan melalui struktural politik.

Bagan Kerangka Konsep





**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Andi Prastowo (2011), mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok, objek, suatu set kondisi, sebuah sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif dapat dikatakan sebagai penyelesaian masalah yang tengah diteliti. Metode ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

Skripsi ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah.

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fristiana Irina (2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak menambahkan simbol atau tanda. dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih terfokus pada fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan dan tidak menggunakan teori. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori.

Pendekatan kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Seperti halnya yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong, dalam Ade Sujastiawan (2018) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif:

Penelitian kualitatif lebih banyak menekankan pada segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan–hubungan bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dengan penelitian kualitatif menghendaki di tetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kritis, karena penelitian ini menyinggung tentang kesetaraan gender. dalam penelitian studi kritis, peneliti harus memandang bahwa masyarakat terbentuk dari orientasi kelas, status, ras, suku, dan lain-lain. Dalam penelitian studi kritis ini, peneliti melakukan analisis naratif, penelitian tindakan, dan penelitian feminisme. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian studi kritis. Pertama, penelitian kritis tidak bersifat deskriptif, meskipun masing-masing memiliki implikasi metodologis. Kedua, penelitian studi kritis menggunakan pendekatan studi kasus, kajian terhadap suatu kasus (kasus tunggal), kajian yang bersifat mendalam yang berbeda dengan kajian eksperimental atau kajian lain yang bersifat generalisasi maupun perbandingan.

## **B. Lokus Penelitian**

Penelitian berlokasi di Kabupaten Wajo yaitu di kantor desa, kantor DPRD Kabupaten Wajo, Pada penelitian ini berkaitan dengan permasalahan analisis



keterlibatan perempuan dalam struktural. Subjek penelitian ini adalah para pegawai desa serta anggota masyarakat khususnya perempuan yang berada di kantor DPRD Kabupaten Wajo.

### **C. Informan penelitian**

Dalam pengambilan data digunakan teknik *Purpose Sampling*, dimana teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap orang yang terkait dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti dan mengspesifikasikan kriteria berdasarkan apa yang ditetapkan oleh peneliti.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan di atas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive Sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

#### Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Hj. Irawati	Anggota DPRD	39
2	Dra. Hj. Husniaty	Anggota DPRD	38
3	Hj. Andi Ratnawati	Anggota DPRD	40
4	Isnaeni	Kepala Desa	35

5	Marlina	Kepala Desa	30
6	Daniar	Kepala Desa	27
7	Husein	PNS	40
8	Mahmud	Petani	37
9	Mase	IRT	36
10	Rini	IRT	30

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

#### **D. Fokus Penelitian**

Menurut Lexy J. Maleong dalam Ade Sujistiawan (2018), tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus penelitian yang diteliti. Adanya fokus penelitian yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subyek penelitian menjadi lebih terarah, kemudian penentuan focus penelitian akan menetapkan kriteria-kriteria untuk menjaring informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini dapat difokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural pemerintahan di Kabupaten Wajo.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakan instrument penelitian. Intrumen penelitian tersebut, yaitu:

1. Lembar observasi, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung dilapangan.

2. Paduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para informan pada saat proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data data observsi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Observasi, merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 tipe observasi, yaitu:
  - a. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan tanpa melakukan panduan observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.
  - b. Observasi partisipasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam kegiatan di lapangan. Observasi partisipasi terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di lokasi, hanya melakukan pengamatan.
  - 2) Observasi partisipasi moderat, dalam observasi ini peneliti ikut langsung dalam kegiatan yang ada di lokasi, tetapi tidak secara keseluruhan.
  - 3) Observasi partisipasi aktif, yaitu peneliti melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan oleh informan, tetapi tidak semua lengkap.
2. Wawancara, merupakan proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial, dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka peneliti dapat menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan instrument untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Terdapat 2 tipe wawancara yang digunakan peneliti, yaitu:
- a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh dengan pasti. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pernyataan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan.
  - b. Wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi, merupakan proses pembuktian data yang didasarkan pada jenis apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran. Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap penelitian.
4. Partisipatif, merupakan metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi social antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu setting selama pengumpulan data yang harus sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

## **G. Jenis Data dan Analisis Data**

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

### 2. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Yanuar Ikbal (2012). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut, yaitu:

1. *Reduction Data* atau reduksi data, adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari data dan polanya serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. *Display data* atau penyajian data, adalah proses penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. *Conclusion Data* atau memverifikasi data, dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan tentang data penelitian serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada sejak awal.

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan

memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompoknya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya.

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

1. Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.
2. Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.
3. Trianggulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk



mengecek kembali tingkat kepercayaan data, dengan begitu akan memberi kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai.

4. Trianggulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah**

Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan masyarakat yang dimulai dari sebuah perkampungan masyarakat yang bernama *Lampulugnge* (kampung yang berada di dekat Danau Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi sebuah asal mula terbentuknya kerajaan *Cinnotlabi*'.

Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang puteri mahkota kerajaan Luwu yang bernama *We Taddangpalie* terpaksa disingkirkan dari kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan menular. *We Taddangpalie* dihanyutkan bersama dengan para pengawalnya sampai akhirnya mereka terdampar di daerah maradeka (merdeka) yang disebut *Cinnottabi*. Puteri tersebut kemudian membangun rumah disebuah pohon kayu besar yang memiliki daun rindang,' yang disebut dengan pohon *Bajo* dan dari nama pohon inilah muncul asal mula nama Wajo.

Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari *Tellu Kajurue* berinisiatif untuk mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul di bawah pohon *Bajo* untuk membicarakan masalah pengangkatan Raja yang akan memimpin ketiga negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga, raja tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat berdasarkan, yaitu adat dan hukum adat yang lahir dari persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat (Indar Arifin: 2006). Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa *La 1*<sup>54</sup> *i* (Arung Mataesso) yang juga sepupu dari raja-raja *Tellu Kajurue* yang diangkat menjadi Raja Wajo dan mendapatkan

gelar *Batara Wajo* sebab beliau dalam hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis.

## **B. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak diantara:  $3^{\circ}39''-4^{\circ}16''$  lintang selatan dan diantara  $119^{\circ}53''-120^{\circ}27''$  bujur timur, dengan luas  $2.506,19 \text{ km}^2$  atau 4,01% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Wajo berbatasan dengan daerah lain, yaitu:

1. Sebelah utara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
2. Sebelah timur berbatasan Teluk Bone.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

Secara administratif, Kabupaten Wajo terbagi atas 14 Wilayah Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 128 Desa, dengan ibu kota kabupaten di Sengkang yang terletak di Kecamatan Tempe.



Peta Kabupaten Wajo

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Wajo

Luas wilayah Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan

No.	Kabupaten	Luas (KM <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Kabupaten
1.	Sabbangparu	137.75	5.3
2.	Tempe	38.27	1.53
3.	Pammana	162.1	66.47
4.	Bola	220.13	8.78

5.	Takkalalla	179.76	7.17
6.	Sajoanging	167.01	6.66
7.	Penrang	154.9	6.18
8.	Majauleng	225.92	9.01
9.	Tanasitolo	154.6	6.17
10.	Belawa	172.3	6.88
11.	Maniangpajo	175.96	7.02
12.	Gilireng	147	5.87
13.	Keera	368.36	14.7
14.	Pitumpanua	207.13	8.26
<b>Kabupaten Wajo</b>		<b>2.506.19</b>	<b>100</b>

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Wajo berdasarkan Kecamatan.

Di dalam khasanah Lontara Wajo, karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terletak dengan posisi "Mangkalungu Ribulue, Massulappe Ripottanangnge, Mattodang Ritasie/Tappareng", yang artinya Kabupaten Wajo memiliki 3 (tiga) dimensi lahan, yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung, utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua, sebagai wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta pengembangan ternak;

2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;

Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur, terbentang sepanjang 203 km garis pantai sebagai wilayah potensial untuk pengembangan perikanan & budidaya tambak.

#### 1. Potensi-potensi daerah

Potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Wajo adalah Wisata Alam seperti Danau Tempe dan Agrowisata Sutera. Disamping itu, juga terdapat lokasi-lokasi wisata yang lain baik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Setiap tahun dilaksanakan acara Festival Danau Tempe dirangkaikan dengan ritual Maccera Tappareng (mensucikan danau) yang dapat menjadi tontonan wisatawan dan mancanegara.

Kabupaten Wajo dikenal sebagai salah satu sentral penghasil beras di Sulawesi Selatan. Bahkan beras dari Kabupaten Wajo didistribusikan keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan beras daerah tetangga seperti Kalimantan dan sebagainya. Lahan masih merupakan lahan tadah hujan, selebihnya adalah sawah pompanisasi, pengairan teknis dan setengah teknis, sehingga dibutuhkan investasi dibidang ini.

Panjang garis pantai Kabupaten Wajo adalah 103 Km yang meliputi enam Kecamatan, sehingga sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan laut. Potensi Perikanan Laut Kabupaten Wajo memiliki laut yang memiliki garis pantainya sepanjang 103 Km yang meliputi enam kecamatan. Panjang garis pantai ini sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan

laut. Penangkapan ikan pada umumnya masih menggunakan sistem tradisional sehingga input teknologi penangkapan berupa sarana pendukung dan peralatan alat tangkap modern sangat dibutuhkan. Selain itu investasi pendirian Pabrik Es juga diperlukan dalam penyediaan Es untuk penanganan hasil tangkapan.

Selain potensi-potensi yang disebutkan di atas, Sengkang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sejak dulu juga dikenal sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang elektronik, kain dan kain sarung bahkan kebutuhan pokok lainnya konon memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Sengkang menjadi salah satu kota dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan.

Disamping dikenal sebagai kota niaga, Sarung Sutera menjadikan ibukota Kabupaten Wajo semakin akrab ditelinga dan hati orang-orang yang pernah berkunjung ke kota ini, kelembutan dan kehalusan tenunan sarung sutera Sengkang sudah sedemikian dikenal bahkan hingga kemancanegara.

Hampir disetiap kecamatan di daerah ini ditemukan kegiatan persuteraan dimulai dari kegiatan proses hulu sampai ke hilir, kegiatan pemeliharaan ulat sutera hingga proses pemintalan menjadi benang yang kemudian ditenun menjadi selembur kain sutera.

Dalam bahasa lokal (Bugis) sutera disebut dengan "Sabbe", dimana dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain sarung sutera masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional yaitu alat tenun gedogan dengan berbagai macam motif yang diproduksi seperti motif "Balo Tettong" (bergaris atau tegak), motif ("Makkalu" (melingkar), motif "mallobang" (berkotak kosong), motif "Balo Renni" (berkotak kecil). Selain itu ada juga diproduksi dengan mengkombinasikan atau menyisipkan "Wennang Sau" (lusi) timbul serta motif "Bali Are" dengan sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain Damas.

Melihat Potensi perkembangan sutera di Wajo, pada tahun 1965 seorang tokoh perempuan yang juga seorang bangsawan "Ranreng Tua" Wajo yaitu Datu Hj. Muddariyah Petta Balla'sari memprakarsai dan memperkenalkan alat tenun baru dari Thailand yang mampu memproduksi sutera asli (semacam Thai Silk) dalam skala besar. Mulai saat itulah perkembangan besar sutera di Kabupaten Wajo.

## 2. Nilai

Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Wajo diangkat dari nilai/budaya tradisional yang dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut secara global dan diterima secara luas oleh masyarakat. Nilai yang dituangkan disini bertolak pada dua bentuk yaitu:

- a. Nilai sosial kemasyarakatan, yang bertolak pada kearifan budaya Wajo (Riassiwajori) yang bertumpu pada 3 nilai-nilai :



1) Sipakatau

Nilai ini mensyaratkan agar dalam membina interkoneksi, sebagai elemen utama dalam wacana kemandirian lokal, seyogyanya dilaksanakan berdasar prinsip kebersamaan yang berbasis pada penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok masyarakat.

2) Sipakalebbi

Nilai ini mensyaratkan agar dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh pergaulan, termasuk melaksanakan aktifitas pembangunan dibutuhkan saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan peran masing-masing dalam rangka mensejahterakan dan menjaga kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

3) Sipakainge

Nilai ini mengedepankan rasa saling mengingatkan dan saling menunjukkan jalan terbaik yang akan ditempuh dalam mewujudkan suatu cita-cita bersama, melakukan koreksi dan saran konstruktif untuk penyelesaian setiap dan menjauhi rasa curiga dan sentimen yang dapat merusak hubungan kemanusiaan, sekaligus merupakan kiat mempertemukan aspirasi sebagai basis dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Nilai Religius/Ketuhanan yaitu : Resopa Natinulu, Temmaginggi  
Malomo Naletei Pammase Dewa.

**BAB V**  
**BENTUK-BENTUK KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM**  
**STRUKTURAL**

## **A. Hasil Penelitian**

### **1. Kuantitas Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo**

Dari data-data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Wajo hingga saat ini masih menampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang menduduki kursi-kursi politik. Dapat kita lihat misalnya saja dari 142 desa yang ada di Wajo, hanya ada 16 desa yang dipimpin oleh perempuan. Jika dipersentasikan hanya ada 13,5 % saja. (tabel nama kepala desa di kabupaten wajo)

Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa perempuan yaitu Ibu IN, mengatakan bahwa jumlah itu masih sangat kurang.(Wawancara, 29 Agustus 2018).

Keterlibatan perempuan sebagai kepala desa di Wajo kiranya masih sangat perlu di tambah lagi. Karena dalam pemerintahan, tenaga dan buah-buah pemikiran perempuan juga sangat dibutuhkan. Megawati saja bisa jadi presiden, masa untuk jadi kepala desa saja kita tidak mampu

Berbeda dengan jabatan struktural, pegawai-pegawai (PNS) di berbagai dinas di kabupaten Wajo sudah mulai mengalami peningkatan kuantitas. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai dinas, badan, instansi maupun sekretariat daerah sudah meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut salah satu informan lainnya, ibu DR yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Abbanuangnge, jumlah kepala desa di Kabupaten Wajo masih tergolong kurang bahkan kebanyakan yang jadi kepala desa hanya meneruskan periode setelah s<sub>62</sub> nya. (Wawancara, 29 Agustus 2018)

Dari 16 kepala desa perempuan saja, sebagian besar diantaranya termasuk saya menjadi kepala desa periode setelah periode

suami sebagai kepala desa. Saya maju karena dorongan suami, artinya saya terpilih pun salah satu faktor pendukung karena sosok suami saya sebelumnya di mata masyarakat. Jadi jumlah kepala desa perempuan bukan hanya butuh ditingkatkan tapi juga butuh kepercayaan diri untuk memberi pengaruh yang besar dari diri sendiri. Bukan karena hanya ikut-ikutan suami. Seperti itulah idealnya sebuah partisipasi politik.

Hanya ada 7 orang perempuan yang masih aktif hingga saat ini dalam perumusan kebijakan atau pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Wajo.

Ibu IR sebagai staf di gedung DPRD menjelaskan bahwa jumlah itu masih sangat memprihatinkan. Jumlah anggota DPRD perempuan hanya meningkat 2 orang saja dari periode sebelumnya dengan jumlah anggota yang bertambah juga yaitu 40.

#### Nama anggota DPRD perempuan di Kabupaten Wajo

NO	Nama Anggota DPRD	Partai
1	Hj. A. Nurhaidah P.S. Sos	Golkar
2	Hj. Irawati Arafa Daga	PPP
3	Dra. Hj. Hasna Hn.Hs	Golkar
4	Yusmiati T Cuga	PPP
5	Marlina, S.Pd	PPP
6	Dra. Hj. Husniaty HS	PDIP
7	Hj. A. Riniawaru Passamula, Se, MM	Golkar

Tabel 5.1 Nama anggota DPRD perempuan di Kabupaten Wajo

## **2. Sebagai Perumus Kebijakan dan Pengambil Keputusan di Kabupaten**

### **Wajo**

Setiap daerah dalam era Otonomi Daerah saat ini tentunya memiliki hak untuk mengelolah rumah tangganya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi, kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda, tentunya itu akan melahirkan kebijakan dan keputusan untuk mencapai kesejahteraan daerahnya.

Dari hasil wawancara dengan ibu IR sebagai staf anggota DPRD Kabupaten Wajo mengungkapkan bahwa sosok perempuan memang dibutuhkan dalam DPRD. Merupakan sebuah kewajaran jika negara kita mengeluarkan kebijakan tentang quota perempuan di kursi legislatif saat ini. Ibu IR berpandangan bahwa anggota DPRD kewalahan karena hanya tujuh orang perempuan di DPRD Kabupaten Wajo. Banyak hal yang membutuhkan sumbangsih pemikiran perempuan. Misalnya saja dalam perumusan kebijakan Keluarga Berencana, perempuan yang lebih banyak dituntut untuk aktif di dalam perumusannya karena perempuan yang paling mengerti kebutuhan dan masalah-masalah saat mengandung dan melahirkan. (Wawancara, 1 september 2018)

Saat ini diadakan penggodokan rancangan perda tentang keluarga berencana yang dirancang bersama BKKBN dan sebagai salah satu anggota DPRD perempuan, banyak hal yang membutuhkan sumbangsih pemikiran kami.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan identitas Kota Sengkang yakni untuk pemberdayaan Kain Sutera dibutuhkan pula partisipasi perempuan. Seperti yang kita ketahui, kain sutera dihasilkan oleh gadis-gadis desa mulai dari pengolahan sampai penenunan.

Menurutnya berdasarkan data dari BPS di Kabupaten Wajo ada 20.000 rumah yang kelebihan perempuan, ini yang tidak menunjang pendapatan rumah tangga atau tidak punya pekerjaan tetap.

*80 persen diantaranya hanya memelihara anak, ini yang perlu di berdayakan melalui produksi sutera hilir. (Wawancara, 1 September 2018)*

Maka dari itu aspirasi dari mereka, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkadang lebih dipahami oleh perempuan. Seperti itulah penuturan dari ibu IR.

Selain itu ibu DR sebagai Kepala Desa menggambarkan dari sisi kepemimpinannya. Sejak beliau menjadi pemimpin di desa Abbanuangnge, ia mampu mengurangi penari seksi saat pesta pernikahan yang biasa disebut “Candoleng-doleng”, dimana daerah abbanuangnge termasuk daerah pelosok.

Jujur yah dek, sebagai perempuan itu adalah hal pertama yang memang ingin saya berantas. Sebagai perempuan kita kan malu melihat perempuan-perempuan yang menjual harga dirinya. Tapi saya tidak hanya berantas saja, tetapi semua penari itu saya beri siraman rohani dan memberi pelatihan-pelatihan yang lebih berguna (Wawancara, 29 Agustus 2018)

Selain dari itu, peneliti juga mendapat beberapa pandangan dari ibu-ibu rumah tangga.

Kita sebagai perempuan terkadang membutuhkan perempuan untuk mendengarkan aspirasi kita. Selama ini tidak pernah ada anggota DPRD perempuan yang berkunjung ke desa ini mungkin karena mereka terlalu sedikit dan desa ini sangat jauh untuk dijangkau. Kalau nanti ada anggota DPRD perempuan kesini, saya hanya ingin meminta bahwa ada baiknya kebijakan lebih memperhatikan lagi untuk janda-janda di daerah kita. Seperti di desa ini, banyak janda yang memiliki banyak anak dan tidak punya pekerjaan. Saya sangat kasihan dengan hal ini dan saya yakin perempuan akan jauh lebih memahami

persoalan-persoalan seperti ini (Wawancara Ibu MS, 03 September 2018)

Dari pemaparan-pemaparan di atas, telah disebutkan beberapa bentuk keterlibatan perempuan mulai dari terlibat dalam perumusan kebijakan sampai pada mengatur sikap dan kondisi di dalam masyarakat.

Menurut ibu IN sebagai kepala desa Lamata, sangat berharap perempuan di Kabupaten Wajo terus memberdayakan dirinya terutama di bidang politik guna untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. (Wawancara, 07 September 2018)

Ibu Risma telah berhasil membawa Surabaya menjadi lebih baik selama menjadi wali kota dengan 51 penghargaan internasional. Menurut survey, banyak rakyatnya yang begitu mencintai sosok pemimpinnya itu karena menggunakan watak keibuan dalam mengayomi masyarakatnya. Kiranya ini bisa menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan untuk mengembangkan minat dan kepercayaan dirinya dalam berpolitik

Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dengan laki-laki, aspirasi mereka kiranya lebih dipahami oleh perempuan pula. Maka sangatlah dibutuhkan sosok perempuan bergabung di tengah-tengah laki-laki untuk memikirkan kesejahteraan bersama.

### **3. Komunikasi**

Tercapainya suatu tujuan organisasi tidak terlepas dari komunikasi yang berjalan dengan baik. Komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi karena sangat menunjang dalam proses kelancaran tugas, dimana terlihat dari fungsinya sebagai menyediakan informasi yang sesuai untuk membuat keputusan, sebagai alat untuk memotivasi anggota, menjelaskan tujuan

organisasi, sebagai alat untuk mengendalikan perilaku dan sebagai media untuk mengungkapkan emosi baik rasa kecewa, puas, maupun senang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu MA, beliau mengatakan bahwa,  
(Wawancara, 10 September 2018)

Salah satu cara kami membesarkan jiwa kami diantara banyaknya anggota DPRD laki-laki adalah dengan berbicara sopan dan cerdas saat ada rapat atau berbincang lepas. Namun dibalik kelembutan kami sebagai anggota perempuan, ada power yang kami berikan kepada anggota lain sehingga mereka juga mendengarkan pandangan dan pendapat kami, contohnya dalam rapat perumusan kebijakan atau rapat-rapat program kerja yang sesuai bidang kami

Pemahaman terhadap keputusan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan terhadap bawahan, tindakan yang dilakukan adalah menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan dengan semaksimalnya sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik agar tercapainya tujuan bersama.

Menurut ibu HY, dalam berkomunikasi baik terhadap pimpinan maupun masyarakat harus memberikan bahasa yang mampu dipahami artinya bahasa harus jelas maksudnya. (Wawancara, 13 September 2018)

Berkomunikasi dengan masyarakat seperti sosialisasi program kerja DPRD haruslah memberikan bahasa yang ringan agar mudah dipahami, kami tidak mungkin memberikan bahasa yang terlalu ilmiah kepada masyarakat karena pendidikan setiap orang berbeda-beda. Kami mensosialisasikan tugas dari pimpinan dengan bahasa kekeluargaan kepada masyarakat agar mereka mampu memahami dan mengapresiasi kami sebagai perempuan yang terlibat di politik

Media komunikasi yang sering digunakan dalam struktural bermacam macam, menurut ibu AR sebagai kepala desa Raddae, media komunikasi yang



sering diterima adalah media surat. Surat menjadi media komunikasi yang sangat efektif . Dengan surat yang mereka terima terjalinlah komunikasi diantara mereka. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara dalam kutipannya bahwa, (Wawancara, 13 September 2018)

Saya sering menerima surat, tentu yang saya maksud bukan surat cinta ya, tutur ibu Ratna. surat yang saya maksud adalah surat yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan maupun dalam penyampaian informasi apapun, dan dengan surat tersebut saya langsung melaksanakan tugas sesuai apa isi yang tercantum didalamnya, contohnya surat dari Kepala pemberdayaan perempuan dan Surat rapat dari pusat.

Dengan menggunakan media komunikasi tersebut baik berupa surat maupun instruksi, nara sumber menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin di Dinas Pendidikan tetap berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Komunikasi yang terjalin bisa menyelesaikan tugas yang ada dan adanya tanggapan dari atasan terhadap bawahan maupun dari bawahan terhadap atasan. Dan surat merupakan media komunikasi yang efisien dalam penyampaian tugas dan informasi terhadap bawahan karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Ditambahkan oleh ibu IR, beliau mengatakan :

Seorang perempuan dalam bersosialisasi bagi yang terlibat dalam struktur baiknya bersosialisasi juga dengan seorang perempuan, karena ketika sosialisasi antara perempuan dengan perempuan itu lebih kena, dalam artian lebih mudah memberikan pemahaman. Hal ini karena hubungan emosional kita itu sama.

Komunikasi menjadi salah satu faktor penting bagi suatu organisasi, tanpa adanya komunikasi maka organisasi tidak akan mengalami suatu perkembangan bahkan tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## **B. Penjabaran Hasil Penelitian**

Eksistensi perempuan dalam jabatan-jabatan politik dalam sebuah daerah tentunya dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas mereka di dalamnya. Tingkat partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan-perempuan untuk mulai memberdayakan dirinya termasuk dalam ikut merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak dan memberi kontribusi yang besar bagi daerahnya.

Selain jabatan kepala desa, tentunya salah satu jabatan politik yang sangat penting pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keterlibatan warga negara sebagai wakil rakyat yang lazimnya disebut sebagai anggota DPR. Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data yang peneliti dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Wajo hanya mencapai 14%. Hanya ada 7 orang dari 40 anggota DPRD.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang luas yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang potensial. Kebijakan yang lahir tentunya diharapkan menampung aspirasi dari segala perbedaan. Kebijakan tentunya harus mempertimbangkan segala sisi.

Dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah pondasi kuat negara. Setiap kebijakan yang lahir akan berdampak pada rakyat itu sendiri. Partisipasi perempuan juga merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan. Pembangunan di setiap daerah membutuhkan partisipasi dari semua golongan termasuk keberadaan perempuan sebagai perumus kebijakan dan pengambil

keputusan. Maka dari itu suara seorang perempuan juga sangat penting dalam perumusan kebijakan untuk menyeimbangkan dan menangani masalah-masalah tertentu.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan identitas Kota Sengkang yakni untuk pemberdayaan Kain Sutera dibutuhkan pula partisipasi perempuan. Seperti yang kita ketahui, kain sutera dihasilkan oleh gadis-gadis desa mulai dari pengolahan sampai penenunan.

Sedikit gambaran bahwa banyak permasalahan di Wajo yang memang membutuhkan penanganan dan partisipasi perempuan. Tapi ini bukan berarti laki-laki tidak bisa menangani masalah tersebut, hanya saja untuk mencapai kondisi yang ideal dan seimbang, partisipasi laki-laki dan perempuan berupa sumbangsih pemikiran serta perjuangan mencapai kehidupan yang lebih baik dari semua pelosok daerah sangat dibutuhkan.

Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dengan laki-laki, aspirasi mereka kiranya lebih dipahami oleh perempuan pula. Maka sangatlah dibutuhkan sosok perempuan bergabung di tengah-tengah laki-laki untuk memikirkan kesejahteraan bersama.

Komunikasi menjadi suatu sarana utama bagaimana suatu organisasi dapat secara sukses atau tidak berhubungan dengan lingkungannya. Adakalanya terjadi kesalah pahaman komunikasi yang dapat menimbulkan tidak tercapainya tujuan utama suatu organisasi. Apabila proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif maka akan mudah bagi setiap orang untuk menyalurkan aspirasi dan akan dapat aktif dalam organisasi.

Seperti dipaparkan diatas bahwa masyarakat butuh perempuan untuk mendengar aspirasi mereka, terutamanya masyarakat perempuan itu sendiri. Perempuan yang terlibat dalam struktural menjadi komunikator bagi strukturalnya serta menjadi komunikan bagi masyarakatnya.

Teori struktural fungsional menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Dalam struktural fungsional menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada sebuah bagian dalam sistem akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap unsur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain atau saling berpengaruh satu sama lain seperti halnya terlibatnya perempuan dalam struktural.

Terlibatnya perempuan dalam struktural menciptakan sebuah perubahan pada bagian bagian tertentu, hubungan emosional antara perempuan lebih baik diatur oleh perempuan sendiri karena di Indonesia hanya ada 2 jenis kelamin yang diakui negara yaitu laki-laki dan perempuan. Terlibatnya perempuan dalam struktural memberikan peluang kepada perempuan lain untuk ikut membangun negara.

Bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam struktural berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu kuantitas perempuan di struktural, adanya partisipasi dalam perumusan kebijakan dan terjalannya komunikasi yang baik di dalam masyarakat. Dengan jumlah perempuan yang semakin meningkat dalam

struktural memberikan motivasi dan mengubah pandangan masyarakat bahwa perempuan mampu melakukan sebuah perubahan bahkan menjadi seorang pemimpin. Keterlibatan perempuan dalam merumuskan kebijakan daerah memberikan sebuah ide-ide baru dalam struktural contoh di DPRD. Tidak hanya itu, jumlah perempuan yang menjadi kepala desa memberikan pandangan kepada perempuan lain bahwa mereka bisa memimpin.

Terlibatnya perempuan dalam struktural dapat menjalin komunikasi yang lebih baik terhadap masyarakat, karena dalam bersosialisasi dengan masyarakat perempuan mampu memberikan pemahaman yang feminis sehingga masyarakat lebih lapang dada dalam mengapresiasi kinerja dari pejabat-pejabat di daerah baik itu di pusat maupun di desa. Jadi dalam keterlibatan perempuan dalam struktural peneliti melihat adanya keteraturan system baik itu di dalam struktural maupun di masyarakat masyarakat. Memberikan kesetaraan bagi kaum perempuan serta menjaga dan mengangkat wibawa seorang perempuan masyarakat Wajo.

### **C. Interpretasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan seorang perempuan dalam struktural memiliki pengaruh yang besar baik itu dalam kinerjanya dalam masyarakat maupun dengan sesama individu dalam struktural. Penelitian ini menunjukkan 2 hal penting atas keterlibatan seorang perempuan yaitu pengaruh pemikiran perempuan terhadap keseimbangan kinerja dalam struktural dan lancarnya komunikasi dimana perempuan dalam struktural sebagai komunikator

dan motivator sesama perempuan di kalangan masyarakat umum. Data itu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
1	Ibu IN	Karena dalam pemerintahan, tenaga dan buah-buah pemikiran perempuan juga sangat dibutuhkan.	Pemikiran seorang perempuan memiliki nilai yang menarik hal ini di dukung dalam ketelatenan seorang perempuan dalam mendalami sebuah pekerjaan	Struktural fungsional
2	Ibu IR	Banyak hal yang membutuhkan sumbangsih pemikiran kami.	Pemikiran perempuan dibutuhkan dalam struktur dan keluarga untuk menyeimbangkan kinerja yang ada	struktural fungsional
3	Ibu MS	Kita sebagai perempuan terkadang membutuhkan perempuan untuk mendengarkan aspirasi kita	Masyarakat membutuhkan seorang yang bergelut di struktural untuk mendengarkan keinginan dan pendapat dari masyarakat umum	Interaksionisme simbolik
4	Ibu IN	Banyak rakyatnya yang begitu mencintai sosok pemimpinnya itu karena menggunakan watak keibuan dalam mengayomi masyarakatnya	Sikap lemah lembut namun di dalamnya memiliki ketegasan dalam memimpin membuat sebagian masyarakat menyukai karakter kepemimpinan seorang perempuan.	Interaksionisme simbolik
5	Ibu MA	Salah satu cara kami membesarkan jiwa adalah dengan	Menjaga etika sebagai seorang perempuan saat berkomunikasi	struktural fungsional

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
		berbicara sopan dan cerdas saat ada rapat atau berbincang lepas.	dan berpandanga memberikan persepsi kepada pria bahwa seorang perempuan memang dibutuhkan untuk terlibat dalam struktural	
6	Ibu HY	Menggunakan bahasa kekeluargaan kepada masyarakat agar mereka mampu memahami dan mengapresiasi kami sebagai perempuan yang terlibat di politik	Komunikasi merupakan sebuah kunci untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Dengan adanya perempuan dalam struktural maka sosialisasi akan berjalan lebih maksimal dengan perempuan di struktural menjadi komunikator pada masyarakat perempuan juga	Interaksionisme simbolik
7	Ibu AR	Melaksanakan tugas sesuai apa isi yang tercantum didalamnya, contohnya surat dari Kepala pemberdayaan perempuan dan Surat rapat dari pusat	Kesetaraan gender menekankan pada kesamaan kewajiban pria dan perempuan sehingga segala tugas yang diberikan kepada seorang perempuan di struktural harus diselesaikan sesuai intruksi dari pusat	struktural fungsional
8	Ibu IR	Sosialisasi antara perempuan dengan perempuan itu lebih kena,dalam artian	Perempuan memiliki hubungan emosional yang sama dengan perempuan lain, jadi	Interaksionisme Simbolik

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
		lebih mudah memberikan pemahaman. Hal ini karena hubungan emosional kita itu sama.	ketika menyampaikan pendapat atau informasi maka setaip perempuan secara tak langsung berkomunikasi dengan nyaman	

Tabel 5.2 Interpretasi hasil penelitian

Keterlibatan perempuan dalam struktural di Kabupaten Wajo memberikan peningkatan yang signifikan dan memberikan pemikiran-pemikiran baru untuk menyeimbangkan pemikiran laki-laki, sehingga ke depannya diharapkan agar perempuan yang memiliki kemampuan dan pendidikan turut andil dalam membangun Desa, Kabupaten dan Kota mereka.

## **BAB VI**

### **IMPLIKASI TERHADAP MASYARAKAT ATAS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTURAL**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Struktural**



Sudah menjadi budaya yang turun-temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, sehingga mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Konsekuensi yang kemudian terjadi adalah jika dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan bernegara, seorang perempuan berhak untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun realitanya masih banyak masyarakat yang menganggap keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah sesuatu yang kurang mendapat respon positif. Di sini nampak sekali terjadi ketidakadilan gender dalam dunia politik. Masyarakat melihat masih banyak yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam segala hal termasuk dalam dunia politik dan kepemimpinan. Bila diamati lebih teliti, budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari struktur kepemimpinan di pemerintahan yang didominasi oleh kaum laki-laki meskipun cukup banyak perempuan yang memiliki keahlian dan pendidikan yang tinggi.

Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan merujuk pada sebuah persepsi, relevansinya adalah interaksi akan memunculkan proses sosial dan tindakan sosial yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah pandangan bagi masyarakat secara umum. Persepsi sendiri merupakan sebuah tanggapan atas apa yang ada atau terjadi dan sebuah tanggapan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses aktif di mana individu menanggapi sesuatu hal,

kemudian menentukan sikap atas realitas sosial yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Pandangan tersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisis mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, di mana pandangan masyarakat ini difokuskan pada respon atau tanggapan masyarakat.

Selain itu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik wakil. mengenai persepsi ini merupakan pandangan yang melihat sejauh mana dukungan yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Cara pandang tidak timbul begitu saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. pandangan seseorang dalam melihat sesuatu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain nilai-nilai kebutuhan individu dan pengalaman individu. Jadi apa yang dilihat oleh seseorang individu dengan individu lain belum tentu sama dengan fakta yang sebenarnya. Dua orang individu yang berbeda akan memberikan tanggapan yang berbeda pula walaupun mereka mengalami hal yang sama. Semua itu tergantung pada bagaimana individu dalam menerima rangsangannya menemukan berbagai pandangan yang beragam dari masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam politik ada yang positif dan adapula yang negatif.

#### **a. Pandangan masyarakat yang bersifat positif**

Pandangan yang bersifat positif muncul karena seseorang yang memiliki anggapan yang baik terhadap keterlibatan perempuan dalam

politik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu informan dengan inisial MS, yang menyatakan bahwa:

perempuan harus bisa bangkit, hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan keterwakilan perempuan dalam kursi politik dan pemerintahan yang hingga saat ini persentasenya masih sedikit. Beliau mengaku sangat bangga dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.

Persepsi positif dapat muncul atas dasar pengalaman pribadi individu dengan sesuatu yang dipersepsi dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam politik.

#### **b. Pandangan masyarakat yang bersifat negatif**

Pandangan yang bersifat negatif muncul karena seseorang yang mempersepsi sesuatu dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam politik kurang setuju terhadap perempuan yang ikut mengambil peran. Masyarakat memiliki beragam alasan terkait dengan kiprah yang akan dijalankan perempuan tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai konsep gender yang dimiliki masyarakat cukup mempengaruhi persepsi yang dimunculkan. Masih ada masyarakat yang mengartikan gender sebagai suatu perbedaan jenis kelamin saja dan menyamakan artinya dengan kodrat. Padahal apabila kita kaji lebih dalam mengenai konsep gender, sesungguhnya gender itu sendiri merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat yang melekat tersebut masih bisa dipertukarkan. Lain halnya dengan kodrat yang sudah menjadi ketentuan dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat

diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang menganggap perempuan sebagai sosok yang kurang pantas untuk dijadikan figur mengingat tugas perempuan dalam urusan domestik itu sangat berat.

Bapak HS mengungkapkan bahwa:

perempuan itu dikasih kodrat untuk mengurus keluarganya, putra-putrinya. Pokoknya baik dan buruknya suatu keluarga itu ditentukan oleh peran si ibu dalam rumah tangga. Mencari nafkah menjadi kewajiban suami. Jadi apabila ada perempuan yang ikut dalam perpolitikan saya pribadi tidak begitu senang.

Dari pernyataan Bapak HS, terlihat jelas bahwa beliau menganggap untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya seutuhnya menjadi tanggung jawab seorang ibu karena merupakan kodrat perempuan. Sedangkan pada dasarnya kodrat yang dimiliki perempuan adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain hal tersebut bukanlah merupakan kodrat bagi perempuan karena sifatnya dapat dipertukarkan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju terhadap keterlibatan perempuan dalam politik adalah karena menurut mereka jenis kelamin tidaklah penting. Namun ada beberapa masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang baik keterlibatan perempuan dalam politik itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MH bahwa:

Dunia politik identik dengan tipu daya maupun janji-janji semu, sementara di luar dunia politik tugas kaum perempuan amatlah berat. Beliau lebih setuju bahwa yang terlibat dalam peran politik itu kaum laki-laki.

Pernyataan Bapak MH memperlihatkan bahwa Bapak MH cenderung memberikan persepsi yang negatif terhadap keterlibatan perempuan dalam

politik, karena beliau menganggap laki-laki lebih pantas untuk dijadikan sebagai figur. Dari pernyataan Bapak MH pula dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat masih menganut budaya patriarki. Secara umum masyarakat Wajo tidak setuju dengan budaya patriarki yang memandang perempuan lemah dan tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Mereka mengakui bahwa perempuan tidak boleh diremehkan dan justru perempuan lebih teliti dari pada laki-laki.

Pernyataan tersebut diungkapkan hampir oleh sebagian informan seperti Ibu RN, sebagai berikut:

justru kalau pemimpinnya seorang perempuan itu biasanya lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih telaten

## **2. Pandangan Hukum dan HAM tentang keterlibatan perempuan dalam struktural**

Keterlibatan seorang perempuan dalam segala bidang telah memiliki perlindungan tersendiri untuk memaksimalkan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Aturan-aturan yang kompleks telah diatur sedemikian rupa agar aspek-aspek yang dibutuhkan oleh seorang perempuan dapat terpenuhi. Peraturan tersebut telah diatur dalam pasal-pasal tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak BS :

Pemerintah telah mengatur undang-undang mengenai kesetaraan gender, artinya bahwa seorang perempuan itu mendapat perlindungan dari Negara untuk berkarya, namun perlu di ingat bahwa harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat

perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Maka dari itu pemerintah mengatur segala hal tentang keadilan gender.

Namun tidak semua masyarakat menganggap hukum yang telah ada ini berfungsi maksimal. Ada yang beranggapan bahwa hukum ini hanya sebagai sampul untuk mengurangi pemberontakan dari seorang perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu AS :

Ada beberapa masalah yang dilewatkan oleh pemerintah, artinya kurang diperhatikan. Masalah HAM bagi perempuan isu gender yang menuntut perhatian adalah masalah penindasan dan eksploitasi. Ya memang benar beberapa perempuan telah mampu terjun dan menjabat di kursi politik. Namun dengan kurangnya perhatian dalam masalah di atas, itu membuat kaum perempuan lain merasa takut untuk ikut andil dalam pembangunan Negara.

Penguatan dalam perlindungan hukum dan HAM masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar kaum perempuan memiliki rasa aman untuk bergabung di bidang mana saja, seperti yang dituturkan Ibu YR :

Memang kalau dilihat sekarang telah banyak perempuan yang mampu bersaing di dunia politik karena adanya UU kesetaraan gender, tapi sebagai catatan bahwa dukungan pemerintah terhadap keterlibatan perempuan harus selalu di evaluasi, karena jangan sampai ada penindasan dari dalam yang dilakukan kaum laki-laki yang tidak nampak, apalagi kalau kita hanya melihat kuantitas perempuan yang turut andil.

Dari penjelasan ibu di atas bahwa dukungan perempuan terhadap keterlibatan seorang perempuan dalam politik ataupun bidang lain telah sangat membantu. Namun pemerintah harus lebih mengawasi dan mengubah aturan apabila ada sesuatu yang fatal terjadi.

### **3. Pandangan Agama ( Ulama ) tentang keterlibatan perempuan dalam struktural**

Perempuan di mata Agama pada zaman Patriarki menekankan perempuan untuk mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan segala hal dalam rumah tangga seperti mengurus anak, karena pada masa itu perempuan sangat tergantung kepada laki-laki dalam hal ekonomi dan perlindungan. Namun dengan perkembangan kondisi dunia, dimana perempuan mulai melihat peluang untuk ikut berpartisipasi dalam segala bidang.

Hal ini mengubah pemikiran-pemikiran ulama melalui dasar yang jelas untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam segala bidang.

Bapak AS mengungkapkan bahwa :

Memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri ataupun kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungan.

Pernyataan bapak AS menjelaskan bahwa beliau setuju dengan keterlibatan seorang perempuan dalam bidang-bidang pekerjaan selama seorang perempuan bisa menjaga memelihara agamanya dan menjaga kehormatannya di mata masyarakat. Beliau menambahkan :

Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (isteri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai pengrajin kulit binatang.

Pernyataan bapak AS ini menjelaskan bahwa perempuan mendapat kebebasan untuk bekerja, dengan berdasar kepada istri Rasulullah Saw dan

istri sahabat Beliau. Hal ini mendapat dukungan dari Bapak WD dengan melihat keadaan sekarang yang menyatakan bahwa :

Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk ke sektor publik yang luas, berdampingan dengan laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan, kantor-kantor, toko-toko, rumah sakit, olah raga, militer, dan lapangan pekerjaan lainnya dengan catatan mereka telah berjanji kepada suami mereka untuk menjaga akhlak mereka. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 12.

Pernyataan bapak WD menjelaskan bahwa perempuan zaman sekarang telah mampu bersaing dalam lingkup bidang tertentu dan itu memang wajar melihat keadaan sosial budaya yang telah berubah, selama seorang perempuan itu mampu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya dan apa yang dikerjakannya itu demi kemaslahatan masyarakat. Dalam hal kepemimpinan bapak UM menambahkan :

Perempuan itu harus menjaga identitasnya sebagai muslimah, perempuan mempunyai hak untuk memegang jabatannya dalam hal pekerjaan hingga jabatan tertinggi sekalipun, dibolehkan asal mereka sanggup dan mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut, sebab dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang sama baik laki-laki maupun perempuan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam pandangan Allah Swt yang membedakanya hanyalah taqwa.

Pernyataan bapak AW di atas menjelaskan bahwa inti dari pemimpin itu adalah mampu dalam artian mampu menjaga amanah dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Jadi laki-laki maupun perempuan yang menjadi pemimpin itu tidak jadi masalah karena kedudukan sebenarnya adalah derajat ketaqwaan di sisi Allah Swt.



## **B. Penjabaran Hasil Penelitian**

Mead dalam teori interaksionalisme simboliknya berpendapat bahwa masyarakat ada sebelum individu dan proses mental atau proses berpikir muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, teori interaksionalisme simbolik adalah sebuah teori yang mempunyai inti bahwa manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, di mana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung. Pada proses berinteraksi tersebut ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan “pemikiran”. Apabila dihubungkan dengan kajian penelitian maka “pemikiran” yang dimaksud oleh Mead adalah persepsi itu sendiri karena merupakan hasil dari proses berpikir individu yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Proses pandangan seseorang tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Masyarakat memiliki hubungan yang erat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, demikian halnya yang terjadi dengan masyarakat. Hubungan erat yang terjadi dalam masyarakat tentunya disebabkan adanya interaksi, namun dengan interaksi juga menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat. Pandangan masyarakat dapat menimbulkan sesuatu yang baik dan dapat pula menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Pandangan tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan perempuan dalam politik. Sebagian masyarakat lebih setuju jika dalam dunia perpolitikan adalah laki-laki karena laki-laki dianggap

lebih memiliki kualitas yang baik untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan perempuan, namun sebagian masyarakat juga mendukung keterlibatan perempuan itu sendiri dengan persepsi bahwa perempuan lebih disiplin dan telaten.

Pandangan dari segi hukum dan HAM memberi wewenang dan perlindungan kepada perempuan yang ingin terlibat dalam struktural melalui undang-undang pemerintah. Berbagai pasal telah diatur untuk menyetrakan kaum pria dan kaum perempuan, namun yang menjadi masalah kemudian yaitu bagaimana perempuan memaksimalkan peluang itu untuk bersaing dengan kaum pria yang sejak dulu memang mendominasi perempuan dalam setiap bidang.

Sisi pandangan agama terhadap keterlibatan perempuan dalam struktural memiliki berbagai hal menarik karena pandangan setiap ulama berbeda-beda. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian dari laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriarki atau peradaban laki-laki dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Pada masyarakat seperti ini, penempatan posisi perempuan demikian boleh jadi memang tepat sepanjang dalam praktiknya tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan (kebaikan).

Apabila penafsiran itu bersifat sosiologis maka terbuka kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan untuk diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaan yang sudah berubah. Pada saat yang sama, kita juga tidak selalu dan terus-menerus menganggap salah ketika perempuan menjadi

pemimpin, penanggung jawab, pelindung dan pengayom bagi komunitas laki-laki, sepanjang hal itu tetap dalam kerangka kerahmatan, keadilan, dan kemaslahatan, atau kepentingan masyarakat luas.

Jadi perempuan itu bisa menjadi pemimpin bagi anak-anak, dan pemimpin pengusaha seperti istri Nabi yang memimpin usaha perdagangan, kemudian kepemimpinan di wilayah publik. Bagi perempuan tidak dipermasalahkan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki potensi dalam memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan mudharat atas dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Terjunnya perempuan dalam dunia politik menimbulkan berbagai argumen dan pandangan dari masyarakat terutama ulama. Pada realitasnya terjunnya perempuan dalam dunia politik, tidak selalu mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Banyak ulama yang masih beranggapan bahwa, tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga dan laki-laki yang menjadi pemimpin atau bekerja.

Adapun ulama yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya perempuan bekerja dan menjadi pemimpin, apalagi saat ini zaman sudah maju, perempuan yang bekerja juga dapat turut andil dalam menopang perekonomian keluarga dan hampir semua lapangan kerja sudah diisi oleh perempuan, banyaknya pihak yang memperkerjakan perempuan didasari oleh banyak hal, salah satunya ialah karena perempuan lebih teliti.

Jadi, pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir yang berbeda-beda ini membuat masyarakat sulit memahami, maka timbullah perbincangan dan perdebatan masyarakat dalam sebuah argumen. Itu salah satu alasan yang membuat sebagian kalangan muslim kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad. Untuk menyikapi hal itu, kembalilah kepada Allah Swt dengan meningkatkan iman dan taqwa, kebenaran hanyalah miliknya, manusia bertugas berikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Perempuan sebagai parner kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan diharapkan kaum laki-laki dapat terus membimbing dan bekerja sama dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga keseimbangan fungsi baik laki-laki maupun perempuan dalam menapaki roda kehidupan dalam segala aspek dapat berjalan dengan baik.

Suara atau pendapat perempuan dapat diikuti sertakan dalam setiap rapat yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Bagi perempuan diharapkan untuk selalu bergerak dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan selalu terbuka apabila terjadi diskriminasi seperti tindakan kekerasan baik diruang domestik maupun di ruang publik. Ulama memberikan pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikannya melalui caramah-ceramah Agar tidak terjadinya kesalahpahaman.

Persoalan sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan prinsip agama dan kemanusiaan Al-akhlak Al-karimah dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam hal kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan, intinya selama keterlibatan perempuan itu masih dalam garis kebaikan.

Menurut pakar interaksionalisme simbolik menunjukkan bahwa individu berusaha mempertahankan diri berdasarkan gender dalam berbagai situasi, dengan kata lain individu mempunyai gagasan tentang makna laki-laki atau perempuan. Individu bertindak berdasarkan jenis kelamin dalam situasi tertentu dan dapat berubah dari situasi ke situasi dengan adanya interaksi. Demikian halnya dengan semakin berkembangnya zaman dan interaksi yang baik dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bisa saja terjadi yang menjadi kepala pemimpin adalah perempuan karena sekarang banyak perempuan yang cerdas dan sekolah tinggi seperti laki-laki.

### C. Interpretasi Hasil Penelitian

Keterlibatan perempuan dalam struktural memberikan pengaruh bagi masyarakat, memberikan makna yang berbeda beda bagi berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari perempuan itu sendiri, masyarakat umum, ulama bahkan dari segi hukum. Hal itu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
1	Ibu MS	perempuan harus bisa bangkit, hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan keterwakilan	Setiap perempuan harus membekali diri semaksimal mungkin agar dapat bersaing,	Struktural fungsional

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
		perempuan dalam kursi politik dan pemerintahan, Beliau mengaku sangat bangga dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.	karena apabila dianggap remeh maka secara tidak langsung keberadaan seorang perempuan dalam sturktural akan tersingkir dengan sendirinya	
2	Bapak HS	perempuan itu dikasih kodrat untuk mengurus keluarganya, putra-putrinya. Pokoknya baik dan buruknya suatu keluarga itu ditentukan oleh peran si ibu dalam rumah tangga.	Peran seorang perempuan dalam lingkup keluarga memang sangat penting untuk memelihara keharmonisan, namun perlu di kritisi bahwa seorang perempuan juga mampu mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan lain	Interaksi simbolik
3	Bapak MH	Dunia politik identik dengan tipu daya maupun janji-janji semu, sementara di luar dunia politik tugas kaum perempuan amatlah berat.	Kehebatan seorang perempuan dapat dilihat dari cara mengatur keluarga dan pekerjaan, dibandingkan dengan pria yang hanya focus mencari nafkah	Interaksi simbolik
4	Ibu RN	justru kalau pemimpinnya seorang perempuan itu biasanya lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih telaten	Perempuan lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih telaten. Fakta ini bisa dilihat dari masyarakat umum dimana seorang perempuan mampu berpendidikan dan mampu mengurus keluarga	Interaksi simbolik
5	Bapak BS	Pemerintah telah mengatur undang-undang mengenai kesetaraan	Dengan adanya hukum yang melindungi HAM seorang perempuan,	Interaksi simbolik

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
		gender, artinya bahwa seorang perempuan itu mendapat perlindungan dari Negara untuk berkarya	maka seorang perempuan tidak lagi takut untuk berkarya dan maju di bidang perpolitikan	
6	Ibu YR	bahwa dukungan pemerintah terhadap keterlibatan perempuan harus selalu di evaluasi	Dari segi evaluasi memang harus selalu diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada	Interaksi simbolik
7	Bapak AS	Memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya	Selama perempuan mampu menjaga akhlak dan agamanya, tidak ada batasan seorang perempuan untuk berkarya	struktural fungsional
8	Bapak AS	Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja dihalalkan	QS. Al-Mumtahanah(60): 12.	Interaksi simbolik
9	Bapak WD	Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk ke sektor publik yang luas, memilih pekerjaan asal sesuai dasar	QS. Al-Mumtahanah(60): 12.	Interaksi simbolik
10	Bapak UM	dalam alquran telah menegaskan bahwa	kedudukan laki-laki dan perempuan sama	Interaksi

NO	INFORMAN	INTERVIEW	INTERPRETASI	TEORI
		manusia diciptakan dari sumber yang sama baik laki-laki maupun perempuan.	derajatnya dalam pandangan Allah Swt yang membedakanya hanyalah taqwa.	simbolik

Tabel 6.1 interpretasi hasil penelitian

#### D. Cara Kerja Teori

Teori interaksionalisme menyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, di mana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung. Berdasarkan teori ini segala pandangan masyarakat atas keterlibatan seorang perempuan dalam struktural itu menjadi hasil dari sebuah interaksi.

Apabila dikaitkan dengan teori Mead seperti diatas, maka dari pandangan sebagian masyarakat tidak setuju dengan keterlibatan seorang perempuan dalam struktural, karena perempuan menurut beberapa informan itu kurang tegas. Hal ini didasarkan pada kodrat seorang perempuan yang lemah lembut yang dimana tugasnya adalah mengurus keluarga.

Namun melihat dari sisi makna yang lain, adapula masyarakat yang mendukung keterlibatan perempuan tersebut karena menurut mereka perempuan itu lebih teliti, disiplin dan telaten. Selain dari itu seorang perempuan juga memiliki pemikiran yang berguna untuk membela hak dari masyarakat perempuan lainnya.

Agama ( ulama ) memaknai keterlibatan perempuan dalam struktural itu wajar saja, karena dalam pandangan Islam derajat laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah taqwa. Jadi apabila perempuan terlibat dalam suatu



pekerjaan, dimana pekerjaan itu halal bagi mereka dalam Islam tidak ada alasan untuk memberi batasan selama mereka mampu menjaga kehormatan, akhlak dan agamanya.

Memaknai hal itu dari segi hukum, perlindungan melalui UU telah diberikan oleh pemerintah. Hal ini jelas bahwa makna interaksi perempuan dalam bidang tertentu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat menurut pandangan pemerintah. Hanya perlu di garis bawahi bahwa keterlibatan itu masih dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hakikatnya keterlibatan seorang perempuan dalam struktural memberikan banyak pengaruh atau makna kepada berbagai kalangan masyarakat seperti dari sisi perempuan itu sendiri, masyarakat umum, pemerintah dan ulama. Dari hasil observasi masyarakat memberikan dukungan kepada perempuan untuk terlibat dalam suatu bidang pekerjaan selama itu untuk kebaikan masyarakat luas.

Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua kalangan masyarakat mendukung keterlibatan perempuan, terutama pada kalangan masyarakat bawah yang masih menganut unsur-unsur budaya lama. Pemberian makna dari prestasi-prestasi perempuan di segala bidang tidak begitu mudahnya bagi mereka untuk diterima. Maka dari itu pandangan dari setiap manusia itu berbeda, tinggal bagai menyikapi makna yang diberikan masyarakat menjadi sesuatu hal yang baik.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kuantitas jumlah perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD maupun Kepala Desa memerlukan peningkatan yang lebih signifikan di kabupaten Wajo khususnya. Kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan lebih ideal jika perempuan ikut aktif dalam perumusan kebijakan. Komunikasi dengan sesama jenis gender lebih efektif karena setiap individu saling memahami baik secara emosional maupun dari tutur kata, maka dari itu perempuan sangat dibutuhkan dalam struktural sebagai komunikator bagi perempuan lain.

Masyarakat kabupaten Wajo mendukung adanya keterlibatan perempuan di dalam struktural, karena masyarakat berpandangan perempuan lebih teliti, disiplin dan telaten. Masyarakat memandang positif keterlibatan perempuan karena perempuan harus bisa bangkit, hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan keterwakilan perempuan dalam kursi politik dan pemerintahan yang hingga saat ini persentasenya masih sedikit. Perempuan yang terlibat dalam struktural harus mampu membagi waktu antara keluarga dan kewajibannya karena pandangan antara masyarakat kalangan bawah berbeda dengan kalangan atas.

## **B. Saran**

93

Sosialisasi politik atau pendidikan politik harus menyentuh ke semua kalangan, seperti halnya kebijakan kuota perempuan di legislatif jangan hanya disosialisasikan di wilayah perkotaan tapi juga di pedesaan agar

pemahaman masyarakat mengenai kebijakan itu lebih merata dan masyarakat khususnya perempuan yang memiliki minat serta pendidikan ikut bterlibat dalam struktural.

Perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik di Kabupaten Wajo sangat diharapkan mampu memberi konstribusi yang baik serta memotivasi perempuan-perempuan dengan menjadi teladan yang baik ketika duduk di legislatif ataupun menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya bermodalkan paras dan materi semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, Arifin. 2008. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers. PT (Persero) dan Percetakan Balai Pustaka.

- Anwar, Arifin. 2014. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Echols, John M, dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cetakan XI. Jakarta: PT Gramedia.
- Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksi Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averpres Press dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS
- Dhani, Ibnu Ahmad. 1992. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Prastowo, A. 2011. *Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2007. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastrawat, Indra. 2014. *Jejak Intelektual Perempuan Bugis, Dahulu & Kini*. Makassar: Kompasiana.
- Arifin, Indar. 2010. "Perempuan, Partisipasi Politik Demokratis dalam Bingkai Otonomi Daerah". Sengkang: Seminar Sehari Pemberdayaan Perempuan.
- Susanti, S., & Lubis, A. 2015. *Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera*. Medan:
- Anggraini, C. E., & Sutarso, J. 2017. "Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PdiP Dan Pks Kota Surakarta". Surakarta: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan INPRES No.9.(2000). Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Tentang kedudukan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan.

Undang-Undang No.7 tahun 1984. Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemitraan Negara Urusan Peranan Wanita.

Perundang-undangan No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Perundang-undangan No. 10 tahun 2008. Tentang kuota perempuan di legislatif.

# LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data tentang “ keterlibatan perempuan dalam struktural ( sebuah kajian sosiologi politik masyarakat Kabupaten Wajo )”.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah perempuan di DPRD saat ini, Apakah jumlah itu sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala desa di Kabupatn Wajo saat ini, apakah jumlah itu sudah cukup ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai caleg-caleg perempuan yang sudah mulai bermunculan saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ?
4. Menurut anda bagaimana anda melihat sebuah kepemimpinan seorang perempuan ?
5. Bagaimana yang ada lihat realitanya apakah ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin , apakah mereka mampu menggerakkan ?
6. Menurut anda sejauh mana pentingnya dan dibutuhkannya partisipasi perempuan pada perumusan kebijakan di Kabupatrn wajo ?
7. Menurut anda sejauh mana pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam sebuah daerah ?
8. Menurut anda, sejauh mana masyarakat wajo menerima dan mengapresiasi perempuan-perempuan yang menjadi kepala desa ?
9. Menurut nda apakah budaya zaman dahulu masih mempengaruhi kepercayaan diri perempuan untuk tampil di depan publik ?

10. Menurut anda, adakah perbedaan pemikiran antara pemimpin perempuan dengan laki-laki atau sama saja ?
11. Dalam hal menjalin hubungan, menurut anda apakah cara berkomunikasi mempengaruhi hubungan antara anggota DPRD atau Kepala Desa dengan masyarakat ?
12. Menurut anda, adakah perbedaan emosional ketika berkomunikasi antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan laki-laki di dalam anggota DPRD maupun berkomunikasi dengan masyarakat ?
13. Menurut anda bagaimana implikasi keterlibatan seorang perempuan dalam struktural terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat ?
14. Menurut anda, apakah seorang perempuan harus terlibat dalam struktural atau hanya menjadi pengurus rumah saja ?
15. Menurut anda, bagaimana pandangan hukum tentang keterlibatan perempuan dalam struktural ?
16. Menurut anda, melihat dari sisi agama bagaimana pandangan anda dengan keterlibatan perempuan dalam struktural ?
17. Apa harapan dan saran-saran anda sebagai perempuan dengan melihat keterlibatan perempuan saat ini di Kabupaten Wajo ?



## DOKUMENTASI

Kantor DPRD Kabupaten Wajo



Anggota-anggota DPRD kabupaten Wajo



Wawancara dengan staf Gedung DPRD



Rapat Anggota DPRD



Wawancara dengan Kepala Desa Mattirowalie



Wawancara dengan Kepala Desa Abbanuangge



Wawancara dengan kepala desa Raddae



Kantor desa Mattirowalie



## RIWAYAT HIDUP



**Ibrahim**, lahir di Anabanua Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 September tahun 1995. Lahir dari pasangan bapak Lukman dan Sitti. Anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2001 di SD Negeri 202 Anabanua dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Maniangpajo dan tamat pada 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya SMA Negeri 1 Maniangpajo dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Program Studi Pendidikan Sosiologi dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah S.W.T bisa menimbah ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.